

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM AREAL MODEL
HUTAN RAKYAT PADA PEMBANGUNAN MODEL DAS
MIKRO (MDM) DI DESA PAPPALUANG, KECAMATAN
BANGKALA BARAT, KABUPATEN JENEPONTO,
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

OLEH :

FANI OKTAVIA KARDIANTI

M 111 05 008



PERPUSTAKAAN PUSAT KHUAS HASANUDDIN	
Tgl. Terima	24-11-09
Asal Dari	Kelent
Banyaknya	1 dus
Marga	Hasan
No. inventaris	51

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN HUTAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2009**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : **Partisipasi Masyarakat Dalam Areal Model Hutan Rakyat Pada Pembangunan Model DAS Mikro (MDM) di Desa Pappaluang, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, Propinsi Sulawesi Selatan.**

Nama : **Fani Oktavia Kardianti**

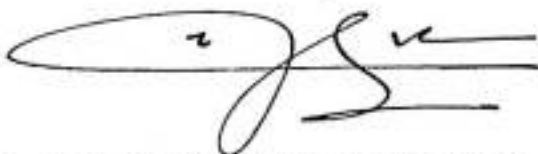
Nomor Pokok : **M 111 05 008**

Program Studi : **Manajemen Hutan**

Skripsi ini Dibuat sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Kehutanan
pada
Program Studi Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin

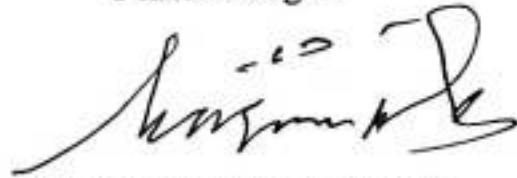
Menyetujui,
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Prof. Dr. Ir. H. Muh. Dassir, M.Si

Pembimbing II



Ir. Abd. Rasyid Kalu, MS

Mengetahui,
Panitia Ujian Sarjana Lengkap
Program Studi Manajemen Hutan
Fakultas Kehutanan



Ir. Budirman Bachtiar, MS
NIP. 19580626 198601 1 001

Tanggal : 23 November 2009

ABSTRAK

Fani Oktavia Kardianti. (M 111 05 008). Partisipasi Masyarakat Dalam Areal Model Hutan Rakyat Pada Pembangunan Model DAS Mikro (MDM) di Desa Pappaluang, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, Propinsi Sulawesi Selatan, dengan bimbingan Muhammad Dassir dan Abd. Rasyid Kalu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan Model DAS Mikro (MDM) di desa Pappaluang Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan (questionnaire) terhadap responden. Populasi penelitian ini adalah petani peserta kegiatan areal model hutan rakyat yang diambil secara random sampling, yaitu nama-nama kelompok peserta kegiatan Hutan Rakyat diidentifikasi kemudian selanjutnya di acak sebanyak lima orang setiap kelompok, sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 30 orang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan areal model hutan rakyat pada kegiatan perencanaan yaitu sebanyak 15 responden atau sebesar 50 %. Pada kegiatan pelaksanaan yaitu sebanyak 26 responden atau sebesar 86,67 %. Pada kegiatan monitoring dan evaluasi terdapat 15 responden atau sebesar 50 %, Partisipasi masyarakat tersebut tergolong dalam partisipasi kategori sedang yang disebabkan karena petani peserta mengikuti kegiatan mendapatkan upah atau imbalan dari kegiatan dan dalam pelaksanaannya masih berdasarkan arahan pelaksana proyek.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji dan Syukur Penulis Panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat Taufiq, Rahmat dan HidayahNya-lah sehingga penyusunan tugas akhir skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya dengan judul skripsi : *Partisipasi Masyarakat Dalam Areal Model Hutan Rakyat Pada Pembangunan Model DAS Mikro (MDM) di Desa Pappaluang, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, Propinsi Sulawesi Selatan* sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin.

Skripsi ini diselesaikan atas bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik dari segi materil maupun moril. Untuk itu, pada kesempatan ini secara khusus penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muh. Dassir, M.Si dan Bapak Ir. Abd. Rasyid Kalu, MS selaku pembimbing yang dengan sabar telah mencurahkan tenaga, waktu dan pikiran dalam mengarahkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tak lupa pula penulis sampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak *Prof. Dr. Ir. H. Muh. Restu, MP* selaku Dekan Fakultas Kehutanan, dan seluruh Dosen Pengajar serta Staf Pegawai Administrasi Fakultas Kehutanan.
2. Bapak *Prof. Dr. Ir. Daud Mallamassam, M.Agr*, selaku Penasehat Akademik.
3. Bapak *Ir. H. Usman Arsyad, MS*, Bapak *Ir. M. Asar Mahbub, MP* dan *Dr. Ir. H. Anwar Umar, MS* selaku penguji yang telah memberikan saran dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak *Abd. Rasyid* dan keluarga yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penelitian di Desa Pappaluang.
5. Sahabat "*the9dragon*" ku : *thiny, inha, nury, uphe, fitri, mega, ian, tin2*, yang selalu setia menemani dan memberikan dukungan.
6. Sobat-sobatku penelitian Partisipasi : *Yenni Sambara, Sukriani Utami Ningsih* dan *Hikmawati Rijal*, atas diskusi dan saran yang telah diberikan.
7. Kakak ku yang baik hati : *abang andri, mas iyan, k'echa, k'zul, k'iin, k'moni, k'wawa, k'rahmat* dan *koro*, atas bantuan dan motivasinya selama penulisan skripsi ini.

Terkhusus, sembah sujud dan hormat kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda *Kardi* dan Ibunda *Umbar Fajar Kasih*, serta adikku *Muh. Fandi Kardianto* dan *Fahmi Kurniawan Kardianto*, yang telah mencurahkan kasih sayang, perhatian, pengorbanan, doa dan motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Kekurangan dan keterbatasan pada dasarnya ada pada setiap sesuatu yang tercipta di alam ini, tidak terkecuali skripsi ini. Untuk itu menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun guna penyempurnaan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makassar, November 2009

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Kegunaan	3
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Partisipasi	4
B. Jenis-jenis Partisipasi	6
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi	12
D. Hutan Rakyat	14
E. Model DAS Mikro (Areal Model Hutan Rakyat)	16
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat	19
B. Populasi dan Sampel Penelitian	19
C. Metode Pengumpulan Data dan Jenis Data	19
D. Metode Analisis Data	20
E. Definisi Operasional	24



BAB IV. KEADAAN UMUM LOKASI

A. Keadaan Fisik Wilayah	25
1. Letak dan Luas	25
2. Topografi dan Iklim	25
3. Iklim	26
4. Tanah	28
5. Pola Penggunaan Lahan	29
B. Kondisi Sosial Ekonomi	29
1. Keadaan Penduduk	29
2. Mata Pencaharian	30
3. Pendidikan	30
4. Agama dan Adat Istiadat	31
5. Sarana dan Prasarana	29

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Program Pembangunan Areal Model Hutan Rakyat	33
1. Perencanaan	33
2. Pelaksanaan	35
3. Monitoring dan Evaluasi	38
B. Partisipasi Petani Pada Program Model DAS Mikro untuk Areal Model Hutan Rakyat.....	40
1. Partisipasi Dalam Perencanaan	40
2. Partisipasi Dalam Pelaksanaan	43
3. Partisipasi Dalam Monitoring dan Evaluasi	46
4. Klasifikasi Tingkat Partisipasi Petani Pada Program Areal Model Hutan Rakyat	47
5. Tingkat Partisipasi Pada Areal Model Hutan Rakyat Menurut Lembaga Formal	50
6. Hubungan Kondisi Sosial Ekonomi dengan Partisipasi Masyarakat	52

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	54
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA	56
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No.	Teks	Halaman
1.	Luas Areal Berdasarkan Kelas Lereng Lokasi Desa Pappaluang Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto	26
2.	Data Curah Hujan Rata-rata Bulanan selama 10 tahun Terakhir di Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto.....	26
3.	Jumlah Bulan Basah, Bulan Kering dan Bulan Lembab selama 10 tahun Terakhir di Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto	27
4.	Klasifikasi Tipe Iklim	28
5.	Pola Penggunaan Lahan Areal Pembangunan MDM di Desa Pappaluang	29
6.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di Desa Pappaluang	30
7.	Kondisi Pendidikan Desa Pappaluang	31
8.	Partisipasi Responden Dalam Perencanaan Kegiatan.....	41
9.	Partisipasi Responden Dalam Pelaksanaan Kegiatan	43
10.	Kalender Musim	45
11.	Partisipasi Responden Dalam Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	47
12.	Rekapitulasi Hasil Analisis Kegiatan	48
13.	Hasil Evaluasi Penilaian Kinerja Kegiatan Pengembangan Hutan Rakyat.....	50
14.	Hubungan Kondisi Sosial Ekonomi dengan Partisipasi Masyarakat	52

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Teks	Halaman
1.	Kuisisioner (Daftar Pertanyaan).....	58
2.	Identitas Responden	62
3.	Skoring Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Perencanaan Areal Model Hutan Rakyat di Desa Pappaluang, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto	63
4.	Skoring Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Pelaksanaan Areal Model Hutan Rakyat di Desa Pappaluang, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto	64
5.	Skoring Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Areal Model Hutan Rakyat di Desa Pappaluang, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto.....	65
6.	Klasifikasi Tingkat Partisipasi Petani Pada Areal Model Hutan Rakyat di Desa Pappaluang, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto.....	66
7.	Peta Desa Pappaluang, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto.....	67

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan rakyat adalah suatu lapangan di luar kawasan hutan negara yang bertumbuh-tumbuhan pohon-pohon sedemikian rupa sehingga secara keseluruhan merupakan persekutuan alam hayati beserta lingkungannya dan lahan dimiliki oleh rakyat. Hutan rakyat memiliki fungsi dan manfaat yaitu memenuhi kebutuhan kayu dan keperluan bangunan, mencegah erosi, memelihara tata air, dan memelihara lingkungan yang baik serta menambah penghasilan masyarakat (Departemen Kehutanan, 1999).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai Pengelolaan DAS yaitu menjaga kelestarian daerah aliran sungai, maka langkah awal yang dilakukan adalah mengembangkan Model Pengelolaan DAS dalam luasan yang kecil (DAS Mikro). Pada DAS Mikro dilakukan semua kegiatan pengelolaan DAS secara lengkap dengan prinsip pengelolaan lahan secara baik yang terkait dengan aspek biofisik, sosial ekonomi dan kelembagaan. Dalam pembangunan Model DAS Mikro (MDM) ini, terdapat satu bentuk kegiatan yaitu Areal Model Hutan Rakyat. Areal model hutan rakyat adalah areal percontohan hutan rakyat yang dibangun oleh rakyat di atas tanah milik dengan jenis tanaman kayu.

Partisipasi adalah keikutsertaan setiap orang dalam setiap upaya perencanaan, pengawasan, pelaksanaan dan menguasai dan memelihara alam, bukan sekedar melaksanakan apa yang telah orang (kelompok) lain rencanakan dan putuskan. Pengertian partisipasi tersebut berakar pada pemahaman bahwa

setiap makhluk yang disebut manusia ini adalah pemilik dan ahli waris yang sah dari dunia (Sihombing, 1980).

Peran serta tidak hanya pengertian di tingkat lokal seperti turut serta, bersama atau individu dalam proyek pemerintah atau tidak hanya dalam hubungan produksi, pengambilan keputusan dan pelaksanaan, tetapi harus lebih luas, peran serta harus meliputi segenap kehidupan masyarakat dalam segala bentuk melalui komunikasi sosial (Adjid, 1985).

Berdasarkan hasil penelitian Pebriani Patandean (2007), partisipasi kelompok tani dalam program RHL di daerah aliran sungai (DAS) Bila Walanae, Desa Benteng Lompoe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, menunjukkan bahwa partisipasi pada kegiatan perencanaan tergolong dalam kategori rendah yaitu sebesar 74,45%. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat disebabkan karena kegiatan perencanaan lebih banyak ditentukan oleh pihak penyelenggara proyek atau pemerintah. Masyarakat masih belum dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan kegiatan maupun proses pengambilan keputusan.

Desa Pappaluang terletak di Sub DAS Pappa, DAS Pamukkulu, dengan luas desa 975 Ha dengan elevasi 200 – 450 meter dpl, yang berada di Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto. Lokasi kegiatan areal model hutan rakyat berada di Desa Pappaluang dengan luas kegiatan hutan rakyat yaitu 125 Ha yang didominasi 60% tanaman kayu Jati Putih (*Gmelina arborea*) dan 40% tanaman MPTS yaitu Jambu Menté (*Anacardium occidentale*). Menurut Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengembangan Hutan Rakyat di lokasi kegiatan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Tahun 2008, menunjukkan

bahwa tingkat keberhasilan kegiatan areal model hutan rakyat yang dilaksanakan di Desa Pappaluang dikategorikan baik dengan persentase tumbuh tanaman sebesar 85,11%. Besarnya tingkat keberhasilan kegiatan areal model hutan rakyat ini mungkin disebabkan oleh besarnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan areal model hutan rakyat mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi.

Untuk dapat memberikan gambaran pemberdayaan masyarakat dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu menjaga kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat, maka perlu diadakan penelitian mengenai bagaimana tingkat “ Partisipasi Masyarakat Dalam Areal Model Hutan Rakyat Pada Pembangunan Model DAS Mikro (MDM) di Desa Pappaluang, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, Propinsi Sulawesi Selatan”.

B. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pembangunan Model DAS Mikro (Areal Model Hutan Rakyat).

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan penyusunan program pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Partisipasi

Istilah partisipasi sering digunakan di dalam kajian tentang peranan anggota masyarakat baik formal maupun non formal. Partisipasi masyarakat dalam program penghijauan atau program pembangunan hutan rakyat pada khususnya dan pembangunan pedesaan pada umumnya sangat diperlukan untuk keberhasilan program yang diinginkan. Suatu program yang menyangkut aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat tidak akan berhasil tanpa peran aktif masyarakat, baik kedudukannya sebagai obyek maupun subyek dalam pengembangan hutan rakyat. Definisi partisipasi digunakan di dalam konteks yang beragam baik secara khusus ataupun umum (Awang, 1999).

Partisipasi yaitu keterlibatan yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok masyarakat atas dasar kehendak sendiri terhadap sesuatu yang dirasakan memberi manfaat. Partisipasi pada prinsipnya mengandung pengertian yang sama dengan peran serta, yaitu mengambil bagian atau berperan dalam proses kegiatan tertentu (Dahlan, 2002).

Partisipasi adalah keikutsertaan setiap orang dalam setiap upaya perencanaan, pengawasan, pelaksanaan dan menguasai dan memelihara alam, bukan sekedar melaksanakan apa yang telah orang (kelompok) lain rencanakan dan putuskan. Pengertian partisipasi tersebut berakar pada pemahaman bahwa setiap makhluk yang disebut manusia ini adalah pemilik dan ahli waris yang sah dari dunia (Sihombing, 1980).

Partisipasi oleh banyak ahli dikaitkan dengan bagaimana upaya mendukung program pemerintah dan upaya-upaya yang pada awal dan konsep pelaksanaannya berasal dari pemerintah. Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam program pemerintah (Rahardjo, 1999).

Peran serta tidak hanya pengertian di tingkat lokal seperti turut serta, bersama atau individu dalam proyek pemerintah atau tidak hanya dalam hubungan produksi, pengambilan keputusan dan pelaksanaan, tetapi harus lebih luas, peran serta harus meliputi segenap kehidupan masyarakat dalam segala bentuk melalui komunikasi sosial (Adjid, 1985).

Department for International Development atau DFID (2006), mengemukakan prinsip-prinsip partisipasi adalah sebagai berikut :

- a. Cakupan - semua orang, atau wakil -wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil- hasil suatu keputusan atau proses - proyek pembangunan misalnya.
- b. Kesetaraan dan Kemitraan (Equal Partnership) Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut terlibat dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.
- c. Transparansi. Semua pihak harus dapat menumbuh-kembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.

- d. Kesetaraan Kewenangan (Sharing Power / Equal Powership). Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.
- e. Kesetaraan Tanggung Jawab (Sharing Responsibility), Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (sharing power) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
- f. Pemberdayaan (Empowerment). Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain
- g. Kerjasama. Diperlukan adanya kerjasama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumberdaya manusia.

B. Jenis-jenis Partisipasi

Partisipasi dalam pengelolaan sumberdaya hutan nasional termasuk dalam pengembangan hutan rakyat sangat penting dimasyarakatkan kepada semua pelaku yang terlibat. Partisipasi tidak berarti hanya berasal dari rakyat dan masyarakat, atau hanya dari pemerintah saja, tetapi partisipasi harus datang dari semua pihak baik rakyat atau masyarakat maupun pemerintah, pihak swasta, dan

lain-lain. Jadi jelas kiranya bahwa yang dimaksud dengan partisipasi adalah kemampuan sistem pengelolaan sumberdaya hutan nasional untuk membuka kesempatan seluas-luasnya kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan untuk mengambil bagian secara aktif, mulai dari kegiatan identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi (Simon, 1999).

Menurut Hobbey (1996), ada 7 tingkatan dan arti partisipasi masyarakat yaitu :

1. Partisipasi Manipulasi (*Manipulative Participation*)

Karakteristik dari model partisipasi ini adalah keanggotaan bersifat keterwakilan pada suatu komisi kerja, organisasi kerja, dan atau kelompok-kelompok. Jadi tidak berbasis pada partisipasi individu.

2. Partisipasi Pasif (*Passive Participation*)

Partisipasi rakyat dilihat dari apa yang telah diputuskan atau apa yang telah terjadi, informasi dari administrator tanpa mau mendengar respon dari rakyat tentang keputusan atau informasi tersebut. Informasi yang disampaikan hanya untuk orang-orang luar yang profesional.

3. Partisipasi Melalui Konsultasi (*Participation by Consultation*)

Partisipasi rakyat dengan berkonsultasi atau menjawab pertanyaan. Orang dari luar mendefinisikan masalah-masalah dan proses pengumpulan informasi, dan mengawasi analisa. Proses konsultasi tersebut tidak ada pembagian dalam pengambilan keputusan, dan pandangan-pandangan rakyat tidak dipertimbangkan oleh orang luar.

4. Partisipasi Untuk Insentif (*Participation for Material Incentives*)

Partisipasi rakyat melalui dukungan berupa sumber daya, misalnya tenaga kerja, dukungan pangan, pendapatan atau insentif material lainnya. Mungkin petani menyediakan lahan dan tenaga, tetapi mereka dilibatkan dalam proses percobaan-percobaan dan pembelajaran. Kelemahan dari model partisipasi ini adalah apabila insentif habis maka teknologi yang digunakan dalam program juga tidak akan berlanjut.

5. Partisipasi Fungsional (*Functional Participation*)

Partisipasi dilihat dari lembaga eksternal sebagai suatu tujuan akhir untuk mencapai target proyek, khususnya mengurangi biaya. Rakyat mungkin berpartisipasi melalui pembentukan kelompok untuk menentukan tujuan yang terkait dengan proyek. Keterlibatan seperti itu mungkin cukup menarik, dan mereka juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, tetapi cenderung keputusan tersebut diambil setelah keputusan utama ditetapkan oleh orang luar desa atau dari luar komunitas rakyat desa yang bersangkutan.

6. Partisipasi interaktif (*Interactive Participation*)

Partisipasi rakyat dalam analisis bersama mengenai pengembangan perencanaan aksi dan pembentukan atau penekanan lembaga lokal. Partisipasi dilihat sebagai suatu hak, tidak hanya berarti satu cara untuk mencapai target proyek saja, tetapi melibatkan multi-disiplin metodologi dan ada proses belajar terstruktur. Pengambilan keputusan bersifat lokal oleh kelompok dan kelompok menentukan bagaimana ketersediaan sumber

daya yang digunakan, sehingga kelompok tersebut memiliki kekuasaan untuk menjaga potensi yang ada di lingkungannya.

7. Partisipasi inisiatif (*Self-Mobilisation*)

Partisipasi rakyat melalui pengambilan inisiatif secara indenpenden dari lembaga luar untuk melakukan perubahan sistem. Masyarakat mengembangkan hubungan dengan lembaga eksternal untuk advis mengenai sumber daya dan teknik yang mereka perlukan, tetapi juga mengawasi bagaimana sumber daya tersebut digunakan. Hal ini dapat dikembangkan jika pemerintah dan LSM menyiapkan satu kerangka pemikiran untuk mendukung suatu kegiatan.

Menurut Djuhendi (2000), jika dicermati, makna partisipasi berbeda-beda menurut mereka yang terlibat, misalnya antara pengambil kebijakan, pelaksana di lapangan, dan masyarakat. Para ahli telah mampu membuat pengklasifikasian partisipasi. Misalnya, ada yang berpendapat bahwa sesungguhnya ada tujuh karakteristik tipologi partisipasi, yang berturut-turut semakin dekat kepada bentuk yang ideal, yaitu:

1. Partisipasi manipulatif. Partisipasi masyarakat ditunjukkan dengan penempatan wakil masyarakat dalam suatu lembaga resmi, namun wakil tersebut tidak dipilih oleh masyarakat itu sendiri dan tidak memiliki kewenangan yang jelas. Artinya, masyarakat diwakili oleh 'lembaga boneka' yang sama sekali tidak representatif.
2. Partisipasi pasif. Masyarakat diberitahu tentang hal-hal yang sudah jadi. Ini merupakan tindakan sepihak dari administratur atau manajer proyek

tanpa menghiraukan tanggapan masyarakat yang bersangkutan. Sumber informasi yang dihargai oleh administratur atau manajer proyek tersebut adalah pendapat para profesional.

3. Partisipasi konsultatif. Masyarakat dimintai tanggapan atas suatu hal. Pihak luar yang merumuskan permasalahan, mengumpulkan informasi, dan melakukan analisis. Bentuk konsultasi tersebut tidak melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pihak luar itu pada dasarnya tidak berkompeten untuk mewakili pandangan masyarakat.
4. Partisipasi dengan imbalan material. Masyarakat berpartisipasi dengan cara memberikan kontribusi sumberdaya yang dimilikinya, misalnya sebagai tenaga kerja, untuk memperoleh imbalan makanan, uang tunai, maupun imbalan material lainnya. Masyarakat boleh jadi menyediakan lahan dan tenaga kerjanya, namun tidak terlibat dalam proses eksperimentasi dan proses pembelajaran. Proses inilah yang selama ini lazim disebut sebagai partisipasi. Dalam konteks seperti itu, masyarakat tidak memiliki pijakan untuk melanjutkan kegiatannya tatkala imbalan dihentikan.
5. Partisipasi fungsional. Partisipasi masyarakat dipandang oleh pihak luar sebagai cara untuk mencapai tujuan proyek, khususnya untuk mengurangi biaya. Masyarakat membentuk kelompok yang sesuai dengan tujuan proyek yang telah ditetapkan sebelumnya. Keterlibatan tersebut boleh jadi bersifat interaktif dan masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan, namun hal itu cenderung terjadi setelah keputusan pokoknya telah dibuat

oleh pihak luar. Lebih buruk lagi, masyarakat lokal tetap sekedar dijadikan sebagai pelayan untuk merealisasikan tujuan-tujuan eksternal.

6. Partisipasi interaktif. Masyarakat berpartisipasi dalam tahapan analisis, pengembangan rencana kegiatan dan dalam pembentukan dan pemberdayaan institusi lokal. Partisipasi dipandang sebagai hak dan bukan sekedar sebagai cara untuk mencapai tujuan proyek. Proses tersebut melibatkan metodologi yang multidisiplin yang membutuhkan perspektif yang majemuk serta membutuhkan proses pembelajaran yang sistematis dan terstruktur. Sebagai kelompok, masyarakat memegang kendali sepenuhnya atas keputusan-keputusan lokal dan kebijakan tentang pendayagunaan sumberdaya yang tersedia. Dengan demikian masyarakat memiliki kewenangan yang jelas untuk memelihara struktur dan kegiatannya.
7. Mobilisasi Swakarsa. Masyarakat mengambil inisiatif secara mandiri untuk melakukan perubahan sistem. Mereka membangun hubungan konsultatif dengan lembaga eksternal mengenai masalah sumberdaya dan masalah teknis yang mereka butuhkan, tetapi tetap memegang kendali menyangkut pendayagunaan sumberdaya. Partisipasi seperti ini akan berkembang pesat jika pemerintah dan LSM menyediakan kerangka kerja pendukungnya. Partisipasi ini barangkali tidak akan mengganggu distribusi kesejahteraan dan kekuasaan masyarakat.

C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi

Menurut Sastropoetro (1988), ada tiga hal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu keadaan sosial masyarakat, kegiatan penyusunan program pembangunan dan keadaan alam sekitar. Keadaan sosial masyarakat meliputi pendidikan, pendapatan, kebiasaan dan kedudukan sosial dalam sistem sosial. Kegiatan program pembangunan merupakan kegiatan yang dirumuskan dan dikendalikan oleh pemerintah, sedangkan keadaan alam sekitar mencakup faktor fisik atau keadaan geografi daerah yang ada pada lingkungan tempat hidup masyarakat tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi anggota masyarakat turut berpartisipasi adalah adanya kesempatan bagi anggota masyarakat untuk berpartisipasi dan kemauan anggota untuk berpartisipasi (Slamet, 1978).

Partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh pendapatan petani, pendidikan dan pengalaman usaha tani, serta ketersediaan tenaga kerja produktif di dalam keluarga petani (Karyawan, 1996).

Menurut Ndraha (1987), bahwa faktor yang turut berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat :

1. Partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau sudah ada dalam masyarakat yang bersangkutan
2. Partisipasi itu memberi manfaat langsung kepada kegiatan masyarakat yang bersangkutan
3. Manfaat yang diperlukan melalui partisipasi itu dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat

4. Dalam partisipasi terjadi adanya kontrol keberhasilan yang dilakukan oleh masyarakat

Selanjutnya menurut Mubyarto dan Kartodirdjo (1994), menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi adalah :

1. Faktor lingkungan fisik, mencakup variabel kesuburan tanah, jenis tanah, iklim, topografi dan orbitasi daerah
2. Faktor sosial ekonomi mencakup variabel jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, status pemilikan rumah/lahan, jumlah tanggungan keluarga, jumlah tenaga kerja keluarga, dan tingkat kesehatan
3. Faktor sosial budaya mencakup variabel norma, nilai, kepercayaan, pengetahuan, sikap, status pernikahan, jenis kelamin
4. Faktor teknologi, mencakup variabel cara-cara dan alat yang digunakan dan pelayanan-pelayanan penyuluhan
5. Faktor kebijakan pemerintah, mencakup variabel sifat koordinatif, kepemimpinan lembaga sosial, pendekatan untuk memotivasi masyarakat dan tingkat kebebasan untuk menyatakan pendapat dan keinginan-keinginan

D. Hutan Rakyat

Hutan rakyat adalah suatu lapangan di luar kawasan hutan negara yang bertumbuh-tumbuhan pohon-pohon sedemikian rupa sehingga secara keseluruhan merupakan persekutuan alam hayati beserta lingkungannya dan lahan dimiliki oleh rakyat. Hutan rakyat memiliki fungsi dan manfaat yaitu memenuhi kebutuhan kayu dan keperluan bangunan, mencegah erosi, memelihara tata air, dan memelihara lingkungan yang baik serta menambah penghasilan masyarakat (Departemen Kehutanan, 1999).

Menurut Hardjanto (2000), hutan rakyat merupakan hutan yang dimiliki oleh masyarakat dan dinyatakan oleh kepemilikan lahan, karena itu hutan rakyat juga disebut hutan milik. Hutan rakyat di Indonesia hanya merupakan bagian kecil dari total keseluruhan, karena fungsinya untuk perlindungan tata air pada lahan-lahan masyarakat, juga penting bagi pemilik sumber penghasil kayu maupun sumber pendapatan rumah tangga, disamping hasil-hasil lain seperti buah, daun, kulit kayu, biji dan sebagainya

Keberadaan hutan rakyat tidaklah semata-mata akibat interaksi alami antara komponen botani, mikroorganisme, mineral, tanah, air, melainkan adanya peranan manusia dan kebudayaannya. Faktor yang mendorong budidaya hutan rakyat adalah faktor ekologis, ekonomi dan budaya, umumnya dibudidayakan di areal lahan-lahan kering daerah hulu. Melalui hutan rakyat dapat diperoleh berbagai manfaat berupa penyediaan kayu bakar, pertukangan, bahan baku industri dan sebagainya, selain itu dapat melindungi alam dari proses pengrusakan tanah serta dapat meningkatkan produktivitas tanah (Suharjito, 2000).

Hutan rakyat merupakan salah satu alternatif yang dipilih dalam upaya mengatasi masalah sosial, ekonomi dan lingkungan hidup, pengelolaan hutan rakyat merupakan bentuk pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya alam dan manusia . Kombinasi berbagai jenis tanaman dapat memberi kemungkinan pemetikan hasil secara terus-menerus dan memungkinkan terbentuknya stratifikasi tajuk sehingga bisa mencegah terjadinya erosi tanah dan hempasan air hujan.

Selain dapat mengatasi masalah lahan dan hutan kritis, hutan rakyat juga bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim didalam dan sekitar hutan. Di luar pulau Jawa, program pembangunan hutan rakyat sedang digalakkan dengan menanam jenis-jenis kayu yang disukai oleh masyarakat, seperti kemiri, sungkai, jambu mente, Sengon dan lain-lain (Indrawati, 2003).

Manfaat dari kegiatan pengelolaan hutan rakyat adalah (1) dapat meningkatkan pendapatan petani, (2) meningkatkan produktivitas lahan, (3) meningkatkan produktivitas kayu baik untuk kayu energi, kayu pertukangan dan lain-lain, (4) tersedianya lapangan kerja, (5) terciptanya lingkungan yang sehat atau nyaman (Balai Konservasi, 1992).

Menurut Balai Konservasi (1992), manfaat hutan rakyat adalah :

1. Untuk meningkatkan pendapatan petani sekaligus meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
2. Memanfaatkan secara maksimal dan lestari lahan yang tidak produktif dan pengelolaannya menjadi lahan yang subur sehingga akan lebih baik untuk usaha tanaman pangan.
3. Meningkatkan produksi kayu perkakas, bahan bangunan dan alat rumah tangga.
4. Untuk penyediaan bahan baku industri pengelolaan yang memerlukan bahan baku kayu, seperti pabrik kertas, pabrik korek api dan lain-lain.
5. Menambah lapangan kerja bagi penduduk di pedesaan.
6. Membantu mempercepat usaha rehabilitasi lahan kritis dalam mewujudkan terbinanya lingkungan hidup sehat dan kelestarian sumber daya alam.

E. Model DAS Mikro (Areal Model Hutan Rakyat)

Areal Model DAS Mikro (MDM) adalah areal percontohan pengelolaan DAS dalam skala lapangan dengan luas sampai dengan 1.000 Ha yang merupakan tempat untuk memperagakan proses partisipatif pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan, teknik-teknik konservasi lahan, sistem usaha tani yang sesuai dengan kemampuan lahan, sosial ekonomi dan kelembagaan masyarakat. Pembangunan MDM merupakan salah satu implementasi tugas pokok dan fungsi Balai Pengelolaan DAS (BPDAS) dalam pengembangan model kelembagaan DAS.

Menurut BPDAS (2005) adapun tujuan pembangunan MDM adalah :

- a. Tersedianya wadah kegiatan pengembangan model pengelolaan dan bentuk penggunaan lahan yang sesuai dan dampak hidrologi yang terukur.
- b. Terwujudnya model pengelolaan lahan yang berkelanjutan
- c. Dihasilkannya data dan informasi pengelolaan DAS yang efektif (dapat diterima dan mudah ditiru) sehingga dapat dikembangkan dalam skala yang lebih luas.

Pendekatan pengelolaan DAS Mikro dimaksudkan untuk menjadi sebuah *pilot project* bagi pengelolaan DAS dengan melibatkan *stakeholders* agar pengelolaan sumberdaya alam dapat terintegrasi dan berkelanjutan baik dari segi fisik maupun sosial ekonomi masyarakat. Pengelolaan MDM merupakan pengelolaan DAS dalam skala kecil di tingkat lapangan yang digunakan sebagai tempat untuk memperagakan proses-proses (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi) kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, teknik-teknik konservasi tanah dan air, usaha tani yang sesuai dengan kemampuan lahan, sosial ekonomi dan kelembagaan masyarakat.

Menurut BPDAS (2005) kegiatan pokok dalam MDM adalah :

- a. Pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kapasitas individu, daya saing, jejaring kerja dan kelembagaan masyarakat sebagai persiapan dalam melaksanakan pengelolaan model RHL dan perhutanan sosial serta pengembangan sistem insentif, disinsentif maupun manajemen konflik yang perlu dilakukan untuk mendukung kelestarian pengelolaan sumberdaya alam.

- b. Pengelolaan lahan dalam bentuk pemanfaatan lahan yang sesuai dengan kemampuan lahannya dengan memberikan perlakuan konservasi yang sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar produktivitas lahan optimal dan kelestarian fungsi lahan dapat dipertahankan.
- c. Pengelolaan tanaman yang meliputi penentuan jenis tanaman, pola tanam, teknik-teknik silvikultur yang sesuai dengan kondisi setempat serta mendukung tujuan-tujuan ekonomi dan ekologi dalam jangka panjang.
- d. Monitoring dan evaluasi faktor-faktor biofisik dan sosial ekonomi secara terus menerus dalam jangka panjang. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan DAS terpadu yaitu partisipatif, berbagi tanggung jawab, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku kayu dan menekan laju kerusakan lingkungan, diperlukan upaya-upaya nyata yang serius dalam pengembangan hutan rakyat dengan melibatkan semua pihak yang terkait.

Untuk itu Pemerintah melalui Departemen Kehutanan telah mengembangkan model hutan rakyat dalam rangka merangsang masyarakat untuk menanam pohon secara swadaya. Kebijakan pengembangan usaha hutan rakyat pada dasarnya adalah upaya pembangunan hutan rakyat dengan melibatkan peran serta (partisipasi) masyarakat sejak proses perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan (BPDAS, 2005).

III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September – Oktober 2009, bertempat di Desa Pappaluang, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, Propinsi Sulawesi Selatan.

B. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah petani yang ikut dalam kegiatan Hutan Rakyat dan melaksanakan tahapan kegiatan hutan rakyat yang berada dilokasi penelitian sebanyak enam kelompok dimana setiap kelompok tani terdapat sebanyak 30 orang anggota. Penentuan jumlah sampel ditentukan secara acak, yaitu nama-nama kelompok peserta kegiatan Hutan Rakyat diidentifikasi kemudian selanjutnya di undi sebanyak lima orang setiap kelompok, sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 30 orang.

C. Metode Pengumpulan Data dan Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara yang menggunakan daftar pertanyaan atau questionnaire dengan responden yang meliputi identitas responden (nama, umur, pendidikan, jumlah anggota keluarga, luas lahan, pekerjaan dan pendapatan petani) dan partisipasi petani dalam kegiatan Hutan Rakyat, mulai dari kegiatan perencanaan (persiapan lapangan), pelaksanaan (penataan areal kerja, pengadaan bibit tanaman, penanaman dan pemeliharaan) dan monitoring dan evaluasi.

Data sekunder, diperoleh dari studi pustaka hasil-hasil penelitian sebelumnya, menyangkut data-data desa, kelurahan, kecamatan, serta instansi terkait yang meliputi keadaan biofisik dan sosial ekonomi masyarakat di Desa Pappaluang.

D. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian ditabulasi dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi dan dianalisis secara deskriptif kualitatif yang menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan Hutan Rakyat. Adapun tahapan analisisnya yaitu :

1. Mendeskripsikan bentuk program Pembangunan Model DAS Mikro untuk Areal Model Hutan Rakyat
2. Mengklasifikasikan petani ke dalam kategori tingkat partisipasi seperti berikut :
 - a. Partisipasi Manipulatif
 - b. Partisipasi Pasif
 - c. Partisipasi Konsultatif
 - d. Partisipasi dengan Imbalan Material
 - e. Partisipasi Fungsional
 - f. Partisipasi Interaktif
 - g. Mobilisasi Swakarsa

Tabel Distribusi Frekuensinya sebagai berikut :

No.	Tingkat Partisipasi	Jumlah Responden	Persentase
1	Rendah (Manipulatif – Pasif)		
2	Sedang (Konsultatif – Imbalan Material)		
3	Tinggi (Fungsional – Interaktif – Mobilisasi Swakarsa)		
	Jumlah Total		

Variabel penelitian yang akan digunakan untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan areal model hutan rakyat menggunakan teknik skoring sebagai berikut :

a. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan

Bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan areal model hutan rakyat yang mencakup sebagai berikut :

1. Partisipasi dalam mengikuti sosialisasi penyuluhan dan pelatihan
2. Partisipasi dalam menyusun rencana kegiatan
3. Partisipasi dalam menyiapkan lahan untuk lokasi kegiatan
4. Partisipasi dalam menyelenggarakan pertemuan kelompok tani
5. Partisipasi dalam menyusun perangkat aturan/kesepakatan kelompok tani

Indikator di atas dapat diukur berdasarkan tingkat partisipasi dengan menggunakan kategori yaitu :

- Rendah= 1 (tergolong partisipasi manipulatif dan partisipasi pasif)
- Sedang= 2 (tergolong partisipasi konsultatif dan partisipasi dengan imbalan material)
- Tinggi = 3 (tergolong partisipasi fungsional, partisipasi interaktif dan mobilisasi swakarsa)

b. Partisipasi dalam pelaksanaan

Bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan areal mosel hutan rakyat yang mencakup sebagai berikut :

1. Partisipasi dalam pemancangan tanda batas dan pengukuran lapangan
2. Partisipasi dalam pembersihan lapangan
3. Partisipasi dalam penentuan arah larikan
4. Partisipasi dalam pembuatan piringan tanaman
5. Partisipasi dalam pembuatan lubang tanaman
6. Partisipasi dalam pengadaan bibit
7. Partisipasi dalam penanaman
8. Partisipasi dalam penyulaman
9. Partisipasi dalam penyiangan dan pendangiran
10. Partisipasi dalam pemupukan
11. Partisipasi dalam pemberantasan hama dan penyakit

Indikator di atas dapat diukur berdasarkan tingkat partisipasi dengan menggunakan kategori yaitu :

- Rendah= 1 (tergolong partisipasi manipulatif dan partisipasi pasif)
- Sedang= 2 (tergolong partisipasi konsultatif dan partisipasi dengan imbalan material)
- Tinggi = 3 (tergolong partisipasi fungsional, partisipasi interaktif dan mobilisasi swakarsa)

c. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan monitoring dan evaluasi

Bentuk partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi kegiatan areal model hutan rakyat, dengan indikator sebagai berikut :

1. Partisipasi dalam monitoring kegiatan
2. Partisipasi dalam evaluasi kegiatan

Indikator di atas dapat diukur berdasarkan tingkat partisipasi dengan menggunakan kategori yaitu :

- Rendah = 1 (tergolong partisipasi manipulatif dan partisipasi pasif)
- Sedang = 2 (tergolong partisipasi konsultatif dan partisipasi dengan imbalan material)
- Tinggi = 3 (tergolong partisipasi fungsional, partisipasi interaktif dan mobilisasi swakarsa)

E. Definisi Operasional

Untuk menuntun peneliti dalam melakukan penelitian dan untuk menyamakan persepsi dengan pihak lain, maka perlu ditetapkan definisi operasional dan pengukuran sebagai berikut :

1. **Partisipasi masyarakat** adalah peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program Areal Model Hutan Rakyat.
2. **Masyarakat** adalah sekelompok orang yang melaksanakan program Areal Model Hutan Rakyat di Desa Pappaluang, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto.
3. **Partisipasi masyarakat** adalah peran serta masyarakat dalam pembangunan areal model hutan rakyat.
4. **Areal Model Hutan Rakyat** adalah areal percontohan pembangunan hutan rakyat dalam rangka merangsang masyarakat untuk menanam pohon secara swadaya. Kebijakan pengembangan usaha hutan rakyat adalah upaya pembangunan hutan rakyat dengan melibatkan peran serta (partisipasi) masyarakat sejak proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi.
5. **Lembaga lokal** adalah organisasi formal maupun non formal yang ada di lokasi penelitian yang bidang kegiatannya berkaitan dengan pelaksanaan Areal Model Hutan Rakyat.
6. **Karakteristik sosial ekonomi** adalah tingkat kondisi sosial responden yang terdiri dari : nama, umur, tingkat pendidikan, pendapatan masyarakat dan luas lahan.
7. **Umur masyarakat** diperhitungkan mulai dari tahun kelahiran masyarakat responden sampai pada saat penelitian dilaksanakan yang dinyatakan dalam tahun.
8. **Tingkat pendidikan** adalah pendidikan formal yang diikuti oleh responden melalui pendidikan sekolah yaitu, SD, SLTP, SLTA, Akademis, dan perguruan tinggi.
9. **Luas lahan** adalah luas areal usaha tani yang dikelola oleh responden yang dijadikan lokasi areal model hutan rakyat.
10. **Pendapatan masyarakat** adalah pendapatan bersih total dari usaha tani yang berhubungan dengan kegiatan pertanian yang dilakukan di areal pertanian mereka
11. **Tingkat partisipasi** adalah tingkat keikutsertaan responden dalam sskegiatan pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan yang diukur berdasarkan jumlah frekuensi dan bentuk, jenis dan tahapan dalam partisipasi.



IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kadaan Fisik Wilayah

1. Letak dan Luas

Desa Pappaluang secara administrasi pemerintahan berada dalam wilayah Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto. Luas wilayah Desa pappaluang adalah 9,75 km² yang terletak sekitar 35 km dari Ibu Kota Kecamatan, 73 km dari Ibu Kota Kabupaten dan 90 km dari Ibu Kota Provinsi. Jalan menuju Desa Pappaluang sebagian besar jalan pengerasan (sekitar 10 km). Waktu tempuh dari jalan poros Jeneponto ke Desa Pappaluang 30 menit sedangkan dari Jeneponto ke Makassar 3 jam.

Adapun Batas-batas dari Desa Pappaluang adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batu Malonro, Kabupaten Gowa
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Komara, Kabupaten Takalar
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Beroanging, Kabupaten Jeneponto
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Marayoka, Kabupaten Jeneponto

2. Topografi

Kadaan topografi Desa Pappaluang pada umumnya berbukit sampai bergunung dengan lereng dari datar, landai, miring hingga curam. Penyebaran luas berdasarkan kelas lereng lapangan disajikan pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1 Luas Areal MDM Berdasarkan Kelas Lereng Lokasi Desa Pappaluang Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto

No.	Kelas Lereng (%)	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	0 – 8	34	6,55
2.	0 – 15	80	15,42
3.	15 – 25	92	17,73
4.	25 – 40	190	36,61
5.	> 40	123	23,69
	Jumlah	519	100,00

Berdasarkan Tabel 1, menunjukkan bahwa wilayah Desa Pappaluang sebagian besar berada pada lereng 25 – 40% yakni seluas 190 Ha atau 36,61% dari total luas Desa Pappaluang. Desa pappaluang berada pada elevasi 200 – 450 meter diatas permukaan laut.

3. Iklim

Data curah hujan bulanan (mm) 10 tahun terakhir dari stasiun PG.

Takalar, Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Data Curah Hujan Rata-rata Bulanan selama 10 Tahun Terakhir di Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto

Tahun	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1999	1014	771	220	X	79	67	45	0	1	X	X	X
2000	473	396	297	112	92	133	18	0	9	103	513	X
2001	578	904	236	136	18	87	0	0	22	84	X	X
2002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2003	556	331	187	125	14	14	0	0	0	50	293	219
2004	405	597	478	51	125	18	31	0	0	2	152	370
2005	282	174	406	177	X	41	X	1	X	191	97	471
2006	485	X	X	X	3	162	0	0	5	0	X	X
2007	564	523	190	351	37	53	2	19	13	45	214	577
2008	X	909	X	X	36	67	4	29	13	148	101	X
Rata-rata	544	575	287	158	50	71	12	5	7	77	228	395

Sumber : Stasiun Klimatologi Kelas I Maros, 2009

Keterangan : 0 : tidak ada hujan

X : tidak ada data

Tabel 3 Jumlah bulan Basah, Bulan Kering dan Bulan Lembab selama 10 Tahun Terakhir di Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto

Tahun	Jumlah Bulan Basah	Jumlah Bulan Kering	Jumlah Bulan Lembab
1999	3	3	2
2000	7	3	1
2001	4	4	2
2002	-	-	-
2003	6	6	-
2004	6	6	-
2005	6	2	1
2006	2	5	-
2007	6	6	-
2008	3	5	-
Jumlah	43	40	6
Rata-rata	4,3	4,0	0,6

Sumber : Stasiun Klimatologi Kelas I Maros, 2009

Berdasarkan kriteria bulan basah dan bulan kering yang ditemukan oleh Mohr, maka selama kurun tahun 10 tahun terakhir dapat ditentukan jumlah bulan basah, bulan kering dan bulan lembab di daerah ini yaitu jumlah bulan basah sebesar 43 dengan rata-rata 4,3 bulan, jumlah bulan kering sebesar 40 dengan rata-rata 4,0 bulan dan jumlah bulan lembab sebesar 6 dengan rata-rata 0,6 bulan. Sehingga dari data tersebut dapat ditentukan nilai Q ratio. Untuk mengetahui tipe iklim di Desa Pappaluang, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto menggunakan rumus :

$$Q \text{ ratio} = \frac{\text{Rata-rata bulan kering}}{\text{Rata-rata bulan basah}} \times 100 \%$$

$$= \frac{4,0}{4,3} \times 100\%$$

$$= 93,02\%$$

Berdasarkan penggolongan iklim dari Schmidt dan Fergusson, maka tipe iklim di Desa Pappaluang, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto termasuk tipe iklim D yaitu berkisar 60 % - 100%. Klasifikasi tipe iklim menurut Schmidt dan Fergusson dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4 Klasifikasi Tipe Iklim Menurut Schmidt dan Fergusson

Tipe Iklim	Nilai Q Ratio (%)	Kondisi Iklim
A	0 – 14,3	Sangat Basah
B	14,3 – 33,3	Basah
C	33,3 – 60,0	Agak Basah
D	60,0 – 100	Sedang
E	100 – 167	Agak Kering
F	167 – 300	Kering
G	300 – 700	Sangat Kering
H	≥ 700	Luar Biasa Kering

4. Tanah

Menurut Peta Tanah Tinjau dari Lembaga Penelitian Tanah (LPT) Bogor (1972) jenis tanah yang terdapat di Desa Pappaluang adalah jenis Laterik dengan tekstur tanah dominan liat debu berpasir dengan solum tanah 45 cm sampai dengan 100 cm. ketebalan lapisan tanah yakni ketebalan solum tanah, ketebalan lapisan efektif dan ketebalan horizon tanah utamanya ketebalan lapisan top soil cukup baik untuk mendukung aktivitas budidaya tanaman dan pertumbuhan pohon. Ketebalan lapisan tanah termasuk sifat fisik tanah yang mempengaruhi kemampuan tanah mendukung pertumbuhan dan perkembangan akar, karna kapasitas menampung dan menyediakan air, udara dan unsur hara.

Berdasarkan hasil analisis kadar bahan organik tanah, menunjukkan bahwa Desa Pappaluang mempunyai kemampuan tanah yang tergolong tinggi serta kemantapan struktur tanah tergolong cukup baik. Kemantapan struktur tanah berkaitan dengan mudah tidaknya tanah terdispersi dan aliran airnya menunjukkan mudah tidaknya tanah tererosi.

5. Pola Penggunaan Lahan

Pola penggunaan lahan di Desa Pappaluang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5 Pola Penggunaan Lahan Areal Pembangunan MDM di Desa Pappaluang

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%
Hutan Rapat	273	52,60
Semak/Belukar	112	21,58
Hutan/Kebun Rakyat	32	6,17
Kebun Tanaman Semusim	30	5,78
Pemukiman/Pekarangan	35	6,74
Sawah	25	4,82
Batu, Sungai dll	12	2,31
Jumlah	519	100

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Desa Pappaluang didominasi oleh penggunaan lahan hutan yakni 273 Ha atau 52,60% dari total luas areal desa Pappaluang. Bentuk penutupan lahan berupa kebun rakyat cukup luas masing-masing 32 Ha atau 6,17% dan semak belukar dengan luas 112 Ha atau 21,58%.

B. Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya

1. Keadaan Penduduk

Penduduk Desa Pappaluang tersebar di empat dusun dengan jumlah penduduk sebanyak 1.668 jiwa dengan jumlah 468 KK, terdiri atas 825 laki-laki dan 843 perempuan. Rata-rata kepadatan penduduk Desa Pappaluang Kecamatan Bangkala Barat adalah 171/Km².

2. Mata Pencaharian

Jenis mata pencaharian masyarakat Desa Pappaluang meliputi petani, pegawai dan lainnya. Dari jenis mata pencaharian tersenut bertani merupakan jenis mata pencaharian utama di daerah ini dengan jumlah penduduk sebanyak 1603 jiwa atau 96,1% sebagai petani, sisanya 65 jiwa atau 3,8% bekerja sebagai pegawai, pedagang dan kegiatan lainnya. Perincian mata pencaharian penduduk di Desa Pappaluang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 6 Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian di Desa Pappaluang

Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase (%)
Petani	1603	96,1
Pedagang	15	0,9
Pegawai	17	1,02
Tukang/Pengrajin	8	0,48
Lain-lain	25	1,5
Jumlah	1668	100

3. Pendidikan

Secara umum tingkat pendidikan di Desa Pappaluang masih sangat rendah. Hasil survey lapangan menunjukkan dari 1688 jiwa penduduk yang ada di wilayah ini hanya 17 jiwa atau 1,02% yang tamat SLTA, yang tamat SLTP 295 atau 17,68% dan sisanya sebanyak 314 jiwa tamat SD. Kondisi pendidikan di Desa Pappaluang adalah sebagai berikut :

Tabel 7 Kondisi Pendidikan Desa Pappaluang

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
Belum Sekolah	454	26,67
Tidak Sekolah	305	18,28
Tidak Tamat SD	275	16,48
SD	314	18,82
SLTP	295	17,68
SLTA	17	1,02
D2	5	0,83
S1	3	0,17
Jumlah	1668	100

4. Agama dan Adat Istiadat

Penduduk Desa Pappaluang berasal dari Suku Makassar dan seluruhnya beragama Islam, bahasa yang dipergunakan sehari-hari adalah Bahasa Makassar. Latar belakang Budaya Makassar yang dimiliki penduduk Desa Pappaluang menyebabkan setiap aspek kehidupan mereka dipengaruhi oleh adat istiadat Makassar. Hal ini nampak dari gaya hidup penduduk yang selalu berpegang pada nilai-nilai Makassar, seperti dalam penggunaan bahasa, bentuk rumah, acara perkawinan, dan lain sebagainya.

5. Sarana dan Prasarana

Fasilitas peribadaan yang terdapat di Desa Pappaluang, yaitu dua buah mesjid sedangkan fasilitas pendidikan yaitu dua buah SD, satu buah SLTP. Untuk pendidikan SLTP belum berfungsi dengan baik karena kurangnya tenaga pengajar sehingga pendidikan SLTP dan SLTA dijalani di luar wilayah Desa Pappaluang.

Sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Desa Pappaluang yaitu satu buah Puskesmas Pembantu (PUSTU) dan empat buah posyandu. Untuk sarana perekonomian seperti pasar, koperasi, dan lain-lain belum tersedia di Desa Pappaluang, sedangkan sarana komunikasi yang ada di Desa Pappaluang berupa Radio dan televisi.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Program Pembangunan Areal Model Hutan Rakyat

Pembangunan model DAS mikro (MDM) terdiri atas beberapa kegiatan, salah satunya yaitu areal model hutan rakyat. Adapun program-program dari areal model hutan rakyat ini adalah :

1. Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan tahap awal yang menentukan arah pelaksanaan program. Adapun kegiatan dalam perencanaan yaitu :

a. Mengikuti sosialisasi penyuluhan dan pelatihan

Petani/masyarakat yang akan terlibat dalam kegiatan Areal Model Hutan Rakyat, diprakondisikan terlebih dahulu melalui penyuluhan/pelatihan untuk menambah pengalaman atau keterampilan serta menumbuhkan kembangkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya Areal Model Hutan Rakyat. Pemerintah dalam hal ini BPDAS berperan dalam memberikan fasilitasi dan bantuan teknis, BPDAS sebagai penyelenggara proyek sangat berperan dalam pelaksanaan kegiatan serta dukungan petani sebagai peserta Areal Model Hutan Rakyat.

b. Menyusun rencana kegiatan bersama-sama penyuluh kehutanan lapangan atau pendamping (LSM)

Dalam penyusunan rencana kegiatan, petani bersama penyuluh kehutanan dari pihak pelaksana proyek bersama-sama menyusun rencana kegiatan proyek, diharapkan petani dapat mengemukakan pendapat mereka mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan di desa mereka.

- c. Menyiapkan lahan milik untuk lokasi kegiatan Areal Model Hutan Rakyat
- Dalam menyiapkan lahan untuk lokasi kegiatan, pelaksana proyek menginventarisasi lahan milik yang akan dijadikan lokasi Areal Model Hutan Rakyat. Selanjutnya petani peserta Areal Model Hutan Rakyat memberi informasi kepada pelaksana proyek tentang lahan mereka yang akan dijadikan areal model.
- d. Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan kelompok tani
- Masyarakat atau petani peserta Areal Model Hutan Rakyat menyelenggarakan pertemuan-pertemuan kelompok tani didampingi oleh LSM. LSM berperan dalam memberikan bimbingan dan penguatan kelembagaan kelompok tani, sedangkan kelompok tani berperan dalam bertanggungjawab untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan.
- e. Menyusun perangkat aturan/kesepakatan-kesepakatan internal kelompok tani
- Kelompok tani membuat aturan-aturan yang mengikat dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan Hutan Rakyat. Tokoh masyarakat dan tokoh adapt berperan dalam memberikan motivasi kepada kelompok-kelompok tani dan pembuatan aturan-aturan internal kelompok tani.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan tujuan, tahapan pelaksanaan mempunyai arti yang sangat strategis dalam menentukan gagal tidaknya suatu program. Masyarakat sebagai pelaksana kegiatan sangat berperan dalam kegiatan pelaksanaan kegiatan ini. Adapun kegiatan dalam pelaksanaan yaitu :

a. Penataan Areal Tanaman

(1) Pemancangan tanda batas dan pengukuran lapangan

Kegiatan ini yaitu untuk menentukam luas serta letak yang pasti sehingga memudahkan perhitungan kebutuhan bibit

(2) Pembersihan lapangan

Kegiatan ini diarahkan pada jalur-jalur yang akan ditanami dengan tanaman pokok seluas 25 Ha.

(3) Penentuan arah larikan serta pemancangan ajir

Penentuan arah larikan dibuat sejajar garis kontur pada semua lokasi, yang kemudian diikuti dengan pemancangan ajir. Jarak antara larikan adalah 4 x 4 meter

(4) Pembuatan piringan tanaman disekeliling ajir

Piringan dibuat dengan Ø 1 meter yang diikuti dengan pemasangan ajir. Pembuatan piringan dimaksudkan untuk membersihkan gulma yang sekaligus persiapan untuk pembuatan lubang tanaman

(5) Pembuatan lubang tanaman

Pembuatan lubang tanaman hendaknya dibuat pada awal musim hujan dengan ukuran 30 x 30 x 30 cm, dimana top soil dipisahkan dengan sub soil, top soil dicampur dengan pupuk kandang kemudian dimasukkan kembali ke dalam lubang dan setelah hujan merata baru dapat dilakukan penanaman tanaman pokok

b. Pengadaan Bibit Tanaman

Pengadaan bibit tanaman untuk pembuatan Areal Model Hutan Rakyat dilakukan melalui pengadaan bibit siap tanam, maka sebelum dilakukan penanaman, bibit tersebut harus dipelihara ditempat penampungan sementara (TPS) disekitar lokasi penanaman untuk penyesuaian dengan kondisi iklim setempat.

Pengadaan bibit tanaman dilakukan oleh petani peserta kegiatan. Petani menyiapkan bibit yang akan ditanam di areal model. Tiap kelompok tani menyiapkan bibit sesuai dengan kebutuhannya. Dimana dalam penyiapan bibit tanaman, bukan hanya ketua kelompok, melainkan beberapa anggota juga ikut aktif dalam kegiatan ini.

c. Penanaman

Apabila lahan sudah siap dan bibit tanaman pokok sudah tersedia maka penanaman dilaksanakan secepat mungkin dan sebaiknya ditanam pada saat musim hujan telah merata. Penanaman hendaknya dilakukan pada waktu pagi hari atau sore hari, hal ini untuk menghindari bibit stres/layu bahkan mati.

d. Pemeliharaan

(1) Penyulaman

Penyulaman dilakukan untuk menggantikan tanaman pokok yang mati atau kurang baik pertumbuhannya dengan tanaman yang sehat. Bibit yang ditanam pada penyulaman tahun berjalan sebaiknya sama dengan bibit tanaman sebelumnya.

(2) Penyiangan dan Pendangiran

Penyiangan dilakukan untuk membebaskan tanaman pokok dari tanaman pengganggu (gulma) yang dilakukan dalam piringan tanaman, sedangkan pendangiran dilakukan dengan menggemburkan tanah dalam piringan tanaman. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan aerasi pada akar tanaman juga dimaksudkan sebagai langkah awal/persiapan untuk pemupukan tanaman.

(3) Pemupukan

Pemupukan dilakukan dengan menggunakan pupuk organik dan an organik. Pupuk organik (Urea, ZA, Kalium) diperlukan dosis 30 – 35 gram/btg atau 20 kg/Ha yang diberikan pada awal dan akhir musim penghujan setelah selesai penanaman tanaman pokok. Pemupukan dengan menggunakan pupuk an organik dengan dosis 30 kg/Ha.

(4) Pemberantasan Hama dan Penyakit

Kegiatan ini dilakukam untuk mencegah kerusakan dan kematian tanaman akibat gangguan organisme, penyakit dan hama tanaman.

Pemberantasan hama dan penyakit ini dilakukan secara fisik (manual) dan dengan menggunakan bahan kimia (pestisida).

Dalam kegiatan pemeliharaan, pengadaan bahan seperti pupuk dan pestisida disiapkan oleh pelaksana proyek. Jika telah tiba waktunya, pelaksana proyek dalam hal ini BPDAS akan memberikan pupuk dan pestisida kepada ketua kelompok tani yang selanjutnya akan dikerjakan oleh ketua kelompok tani beserta anggota kelompok tani lainnya untuk digunakan di areal model hutan rakyat.

Begitu pula dalam pemberian insentif kegiatan, pelaksana proyek (BPDAS) akan memberikan imbalan atau insentif kegiatan apabila item-item pekerjaan telah selesai dikerjakan yang dikoordinir oleh ketua kelompok tani.

3. Monitoring dan Evaluasi

Maksud diadakannya monitoring dan evaluasi (monev) adalah untuk mengetahui status dan perkembangan aspek biofisik, sosial ekonomi dan kelembagaan pada areal MDM khususnya areal model hutan rakyat. Selanjutnya hasil monev akan digunakan sebagai bahan masukan bagi peningkatan dan perbaikan program pengelolaan DAS terkait. Sasaran monev areal MDM adalah segenap penerima manfaat/*stakeholders* dari adanya program ini yang meliputi aspek lingkungan biofisik, ekonomi dan sosial budaya kemasyarakatan. *Stakeholders* yang dimaksud adalah masyarakat khususnya petani peserta Areal Model Hutan Rakyat. Petani dan pelaksana proyek bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu sistem monev yang dikembangkan perlu

melibatkan segenap *stakeholders* sesuai tugas pokok dan fungsinya. Data dan informasi hasil monev akan digunakan sebagai bahan kajian untuk menyempurnakan kelemahan-kelemahan yang ada pada setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada waktu yang akan datang.

B. Partisipasi Petani Pada Program Model DAS Mikro (MDM) untuk Areal Model Hutan Rakyat

Tingkat partisipasi yang diteliti dalam Areal Model Hutan Rakyat dibagi dalam tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi. Tinggi rendahnya partisipasi petani dapat dilihat dari sejauh mana keterlibatan mereka dari masing-masing tahapan program.

1. Partisipasi dalam Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan tahap awal yang menentukan arah pelaksanaan program. Partisipasi dalam perencanaan merupakan jenis partisipasi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengemukakan pendapat untuk menilai suatu rencana/program yang akan ditetapkan. Dalam tahap perencanaan kegiatan areal model hutan rakyat dikategorikan dengan beberapa kegiatan yaitu mengikuti sosialisasi penyuluhan dan pelatihan, penyusunan rencana kegiatan, menyiapkan lahan untuk lokasi kegiatan, menyelenggarakan pertemuan kelompok tani dan menyusun perangkat aturan/kesepakatan kelompok tani. Klasifikasi tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan kegiatan areal model hutan rakyat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8 Partisipasi Responden dalam Perencanaan Kegiatan

No.	Kegiatan Perencanaan	Kategori							
		Rendah		Sedang		Tinggi		Total	
		f	%	f	%	f	%	f	%
1.	Mengikuti sosialisasi penyuluhan dan pelatihan	13	43,33	10	33,33	7	23,33	30	100
2.	Penyusunan rencana kegiatan	17	56,67	9	30	4	13,33	30	100
3.	Menyiapkan lahan untuk lokasi kegiatan	0	0	3	10	27	90	30	100
4.	Menyelenggarakan pertemuan kelompok tani	12	40	16	53,33	2	6,67	30	100
5.	Menyusun perangkat aturan/kesepakatan kelompok tani	5	16,67	23	76,67	2	6,67	30	100

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2009

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa petani responden berpartisipasi pada tahap perencanaan. Melalui tabel di atas dapat diketahui bahwa kegiatan mengikuti sosialisasi penyuluhan dan pelatihan didominasi dengan kategori partisipasi rendah yaitu sebanyak 13 responden atau sebesar 43,33 %, demikian juga dengan penyusunan rencana kegiatan didominasi dengan kategori rendah, yaitu sebanyak 17 responden atau sebesar 56,67 %. Pada kategori partisipasi rendah, menunjukkan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi dan penyusunan rencana kegiatan areal model hutan rakyat disebabkan karena kegiatan tersebut lebih banyak ditentukan oleh pihak pelaksana proyek, masyarakat masih belum dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan. Kewenangan ditentukan oleh pihak instansi penyelenggara proyek dan masyarakat tani hanya menerima dan melaksanakan. Responden yang mendominasi partisipasi rendah yaitu responden yang kedudukannya dalam kelompok tani adalah sebagai anggota kelompok. Dalam kegiatan sosialisasi penyuluhan dan

pelatihan serta penyusunan rencana, responden ini hanya diajak atau dipanggil oleh aparat desa dan petugas kegiatan untuk mengikuti kegiatan, sehingga dalam pelaksanaannya, responden hanya mengikuti tanpa terlibat secara aktif.

Pada kegiatan pertemuan kelompok dan menyusun aturan kelompok didominasi dengan kategori partisipasi sedang, yaitu sebanyak 16 responden atau 53,33 % dan 23 responden atau sebesar 76,67 %. Pada kategori partisipasi sedang, menunjukkan bahwa masyarakat berpartisipasi mengikuti kegiatan tersebut karena mendapatkan imbalan dengan mengikuti pertemuan kelompok serta dalam penyusunan aturan kelompok tani lebih didominasi oleh ketua kelompok dan tokoh masyarakat seperti Kepala Dusun dan Aparat Desa. Masyarakat masih belum dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam kegiatan ini, ketua kelompok tani, kepala dusun dan sekretaris desa yang juga termasuk anggota kelompok tani lebih berperan aktif, responden lain mengikuti kegiatan karena mendapat imbalan dengan mengikutinya.

Namun pada kegiatan menyiapkan lahan untuk lokasi kegiatan didominasi partisipasi tinggi, yaitu sebanyak 27 responden atau sebesar 90 %. Partisipasi tinggi yaitu pada kegiatan menyiapkan lahan untuk lokasi kegiatan karena masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan lahan mereka dalam program areal model hutan rakyat. Hampir semua responden yaitu anggota kelompok tani berpartisipasi, mereka tahu manfaat akan penggunaan lahan tersebut, mereka mengizinkan lahan digunakan untuk lokasi kegiatan dengan turut bekerja pada lahan mereka.

2. Partisipasi dalam Pelaksanaan

Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan adalah keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan berdasarkan program yang telah ditetapkan. Bentuk partisipasi ini dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang aktif dalam pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan tujuan, tahapan pelaksanaan mempunyai arti yang sangat strategis dalam menentukan gagal tidaknya suatu program. Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan program adalah masyarakat yang langsung berhubungan dengan lokasi dan kegiatan. Tahap pelaksanaan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dapat dikategorikan dalam beberapa kegiatan yaitu penataan areal tanaman (pemancangan tanda batas dan pengukuran lapangan, pembersihan lapangan, penentuan arah larikan, pembuatan piringan tanaman, dan pembuatan lubang tanaman), pengadaan bibit, penanaman dan pemeliharaan (penyulaman, penyiangan dan pendangiran, pemupukan dan pemberantasan hama dan penyakit). Klasifikasi tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program areal model hutan rakyat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9 Partisipasi Responden dalam Pelaksanaan Kegiatan


No.	Kegiatan Pelaksanaan	Kategori							
		Rendah		Sedang		Tinggi		Total	
		f	%	f	%	f	%	f	%
1.	Pemancangan tanda batas dan pengukuran lapangan	2	6,67	8	26,67	20	66,67	30	100
2.	Pembersihan lapangan	3	10	22	73,33	5	16,67	30	100
3.	Penentuan arah larikan	1	3,33	1	3,33	28	93,33	30	100
4.	Pembuatan piringan tanaman	1	3,33	6	20	23	76,67	30	100
5.	Pembuatan lubang tanaman	0	0	10	33,33	20	66,67	30	100
6.	Pengadaan bibit	8	26,67	13	43,33	9	30	30	100
7.	Penanaman	0	0	13	43,33	17	56,67	30	100
8.	Penyulaman	2	6,67	15	50	13	43,33	30	100
9.	Penyiangan dan Pendangiran	5	25	6	30	9	45	20	66,67
10.	Pemupukan	9	30	11	36,67	10	33,33	30	100
11.	Pemberantasan Hama dan Penyakit	9	45	5	25	6	30	20	66,67

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2009

Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa petani dalam pelaksanaan program areal model hutan rakyat berpartisipasi rendah. Kegiatan yang termasuk partisipasi rendah yaitu kegiatan pemberantasan hama dan penyakit dengan 9 responden atau sebesar 45 %. Termasuk kategori partisipasi rendah karena pada kegiatan tersebut masih ada kelompok tani yang belum melaksanakan kegiatan pemberantasan hama dan penyakit karena dua areal model hutan rakyat baru akan melaksanakan kegiatan tersebut dengan jumlah responden 20 orang petani peserta kegiatan dan masyarakat mengerjakan berdasarkan tata cara pelaksanaan dari pelaksana proyek. Setelah melakukan penanaman, petani beranggapan selesai pula tugas mereka, petani melakukan pemeliharaan hanya sekedarnya saja dan tidak secara intensif. Luas lahan garapan yang lebih besar dari tenaga yang tersedia juga mempengaruhi kinerja petani, sementara dalam pelaksanaan kegiatan telah ada jadwal yang ditentukan oleh pelaksana proyek.

Tabel 10 Kalender Musim

Jenis Tanaman	Aktivitas	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Padi	1. Persiapan Lapangan												
	2. Tanam												
	3. Pemeliharaan												
	4. Panen												
Jagung	1. Persiapan Lapangan												
	2. Tanam												
	3. Pemeliharaan												
	4. Panen												

Keterangan :  = waktu aktivitas pembangunan MDM

Berdasarkan kalender musim diatas dapat diketahui bahwa persiapan lapangan untuk menanam padi di sawah yaitu pada waktu musim hujan datang atau bulan desember, hingga waktu panen pada bulan maret sampai bulan april. Untuk tanaman semusim yaitu jagung, pada bulan mei dilakukan persiapan lapangan selama 1 minggu dan dilanjutkan dengan kegiatan penanaman, hal ini dilakukan pada sawah dan kebun. Kegiatan pemeliharaan dan pemanenan pada bulan juli. Tanaman padi ditanam pada bulan 12 dan pemanenan pada bulan maret. Setelah itu dilanjutkan dengan menanam jagung dimulai pada bulan mei sampai dengan pemanenan jagung pada bulan juli. Setelah bulan juli tidak ada kegiatan penanaman karena musim kemarau. Dapat dilihat dari kalender musim di atas, bahwa kegiatan petani bersamaan dengan kegiatan hutan rakyat di lapangan, terkadang petani peserta kegiatan harus membagi waktu mereka dalam pelaksanaan kegiatan, yang dapat membuat partisipasi petani pada kegiatan pemberantasan hama dan penyakit menjadi rendah.

Kegiatan yang termasuk kategori sedang yaitu pembersihan lapangan dengan 22 responden atau sebesar 73,33 %, pengadaan bibit dengan 13 responden atau sebesar 43,33 %, penyulaman dengan 15 responden atau 50 % dan pemupukan dengan 11 responden atau 36,67 %. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang berpartisipasi ingin mendapatkan imbalan dari kegiatan yang mereka kerjakan, sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam anggaran kegiatan. Mereka belum mengetahui manfaat dari kegiatan tersebut sehingga dalam pelaksanaannya masih berdasarkan arahan pelaksana proyek.

Sedangkan yang berpartisipasi tinggi dapat dilihat pada kegiatan penataan areal tanaman, penanaman dan penyiangan dan pendangiran, hampir semua responden berpartisipasi tinggi. Dapat dilihat pada kegiatan penataan areal tanaman yang termasuk kategori partisipasi tinggi yaitu pemancangan tanda batas dan pengukuran lapangan ada 20 responden atau sebesar 66,67 % yang berpartisipasi tinggi, penentuan arah larikan sebanyak 28 responden atau sebesar 93,33 %, pembuatan piringan tanaman sebanyak 23 responden atau sebesar 76,67 %, pembuatan lubang tanaman yaitu 20 responden atau sebesar 66,67 %, penanaman terdapat 17 responden atau sebesar 56,67 % dan penyiangan dan pendangiran dengan 9 responden atau sebesar 45 % dengan jumlah responden 20 orang yang berpartisipasi. Hal ini dikarenakan masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini dengan tinggi atau secara baik, kegiatan penataan areal tanaman dan penanaman dilaksanakan sesuai dengan petunjuk proyek dan masyarakat tahu akan manfaat dari kegiatan yang mereka laksanakan. Petani menginginkan bibit tanaman yang akan ditanam di lahan mereka sendiri untuk

dipelihara, dengan harapan bahwa mereka dapat meningkatkan produksi dari lahan mereka. Petani melaksanakan kegiatan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan proyek yang juga dikoordinir oleh ketua kelompok masing-masing.

3. Partisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi

Partisipasi dalam monitoring dan evaluasi adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk keikutsertaan dalam mengawasi dan menilai kegiatan serta hasilnya. Partisipasi dalam monitoring dan evaluasi merupakan salah satu kegiatan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai. Partisipasi petani dalam monitoring dan evaluasi dilihat dari kehadiran dalam pertemuan evaluasi serta melaporkan kemajuan pelaksanaan program. Untuk mengetahui tingkat partisipasi petani dalam kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 11 Partisipasi Responden dalam Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

No.	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Kategori							
		Rendah		Sedang		Tinggi		Total	
		f	%	f	%	f	%	f	%
1.	Monitoring	13	43,33	7	23,33	10	33,33	30	100
2.	Evaluasi	6	20	11	36,67	13	43,33	30	100

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2009

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan monitoring program areal model hutan rakyat tergolong rendah dimana persentase yang paling tinggi berada pada tingkat partisipasi kategori rendah yaitu 13 responden atau sebesar 43,33 %, yang berarti sebagian petani tidak intensif menghadiri pertemuan monitoring yaitu mengawasi dan melaporkan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Masyarakat menganggap bahwa kegiatan monitoring merupakan pekerjaan dari instansi pelaksana kegiatan. Masyarakat

memiliki kesibukan lain, sehingga kegiatan monitoring lebih banyak dilakukan oleh ketua kelompok tani dan tokoh masyarakat bersama petugas lapangan yang ada.

Sedangkan pada kegiatan evaluasi program areal model hutan rakyat, berada pada kategori partisipasi tinggi yaitu 13 responden atau sebesar 43,33 %, hal ini dikarenakan masyarakat ingin mengetahui sejauh mana hasil kegiatan yang telah mereka kerjakan dengan ikut menilai hasil kegiatan yang dilakukan dan menghadiri rapat evaluasi yang diadakan oleh instansi pelaksana program.

4. Klasifikasi Tingkat Partisipasi Petani Pada Program Areal Model Hutan Rakyat

Rekapitulasi hasil analisis terhadap tiga jenis kegiatan partisipasi pada kegiatan areal model hutan rakyat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 12 Rekapitulasi Hasil Analisis Kegiatan

No	Tingkat Partisipasi	Jenis Kegiatan					
		Perencanaan		Pelaksanaan		Monitoring dan Evaluasi	
		Responden	%	Responden	%	Responden	%
1	Rendah (Manipulatif – Pasif)	14	46,67	4	13,33	10	33,33
2	Sedang (Konsultatif – Imbalan Material)	15	50	26	86,67	15	50
3	Tinggi (Fungsional – Interaktif – Mobilisasi Swakarsa)	1	3,33	0	0	5	16,67
Jumlah		30	100	30	100	30	100

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2009

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa tiga kegiatan pada areal model hutan rakyat yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi berada pada kategori partisipasi sedang yang termasuk dalam jenis partisipasi konsultatif dan imbalan material. Partisipasi Konsultatif yaitu Masyarakat dimintai tanggapan

atas suatu hal. Pihak luar yang merumuskan permasalahan, mengumpulkan informasi, dan melakukan analisis. Bentuk konsultasi tersebut tidak melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pihak luar itu pada dasarnya tidak berkompeten untuk mewakili pandangan masyarakat. Sedangkan Partisipasi dengan imbalan material yaitu Masyarakat berpartisipasi dengan cara memberikan kontribusi sumberdaya yang dimilikinya, misalnya sebagai tenaga kerja, untuk memperoleh imbalan makanan, uang tunai, maupun imbalan material lainnya. Masyarakat boleh jadi menyediakan lahan dan tenaga kerjanya, namun tidak terlibat dalam proses eksperimentasi dan proses pembelajaran. Proses inilah yang selama ini lazim disebut sebagai partisipasi. Dalam konteks seperti itu, masyarakat tidak memiliki pijakan untuk melanjutkan kegiatannya tatkala imbalan dihentikan.

Dari dua pengertian partisipasi tersebut, dalam pelaksanaannya masyarakat atau petani peserta kegiatan bekerja berdasarkan pelaksana proyek, kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat hanya sesuai petunjuk proyek tanpa meminta tanggapan dari masyarakat tentang kegiatan tersebut. Masyarakat juga masih bergantung pada insentif yang diberikan oleh pelaksana proyek dalam pelaksanaan program.

Dari tiga kegiatan tersebut, partisipasi masyarakat sudah cukup bagus, namun masyarakat tetap perlu diberitahu tentang manfaat dari kegiatan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya meski tidak ada anggaran biaya dari pelaksana proyek, masyarakat akan tetap berpartisipasi dan melaksanakan kegiatan tersebut.

5. Tingkat Partisipasi Pada Areal Model Hutan Rakyat Menurut Lembaga Formal

Partisipasi masyarakat pada areal model hutan rakyat juga dilihat berdasarkan penilaian dari pelaksana proyek yaitu BPDAS Jeneberang Walanae. Berdasarkan hasil evaluasi penilaian kinerja pelaksana proyek, menunjukkan bahwa kinerja pada pelaksanaan kegiatan pengembangan hutan rakyat di lokasi MDM di Kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 13 Hasil Evaluasi Penilaian Kinerja Kegiatan Pengembangan Hutan Rakyat

No	Jenis Kegiatan	Volume Fisik	Lokasi	Nilai Skor	Predikat Kinerja
1.	Pembuatan Areal Model Hutan Rakyat	1 Unit/25 Ha	Lompo Durian/Pappaluang	9,80	Baik
		1 Unit/25 Ha	Jemu/Pappaluang	9,10	Baik
2.	Pemeliharaan Areal Model Hutan Rakyat Tahun I	1 Unit/25 Ha	Tacokkoang/Pappaluang	9,80	Baik
		1 Unit/25 Ha	Pumbanti/Pappaluang	9,80	Baik
3.	Pemeliharaan Areal Model Hutan Rakyat Tahun II	1 Unit/25 Ha	Tanete Belaya/Pappaluang	9,80	Baik
		1 Unit/25 Ha	Mappasaranga/Pappaluang	9,80	Baik

Sumber : DIPA BA.29 BPDAS Jeneberang Walanae Tahun 2008.

Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa penilaian kinerja kegiatan pengembangan hutan rakyat yang dilaksanakan oleh BPDAS Jeneberang Walanae yang dikerjakan oleh petani peserta areal model hutan rakyat adalah baik. Dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam seluruh kegiatan areal model hutan rakyat adalah baik. Petani peserta kegiatan mengikuti semua kegiatan yang ada pada program areal model hutan rakyat khususnya dan pembangunan model DAS mikro pada umumnya.

Evaluasi yang dilakukan oleh BPDAS ini dilakukan dengan mempelajari buku rancangan teknis pengembangan hutan rakyat di lokasi MDM sebagai dasar penilaian kinerja. Parameter kinerja yang dinilai adalah menyangkut aspek manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi. Aspek manajemen tersebut masing-masing diberi bobot, untuk aspek perencanaan diberi bobot 20 %, aspek pelaksanaan diberi bobot 70 % dan aspek monitoring dan evaluasi diberi bobot 10 %. Kinerja satuan kerja merupakan skor total komponen aspek perencanaan x 20 % + skor total komponen aspek pelaksanaan x 70 % + skor total aspek monitoring dan evaluasi x 10 %. Predikat satuan kinerja ditentukan dengan mengacu pada interval nilai yang dihitung berdasarkan skoring nilai maksimal dari masing-masing aspek yaitu aspek perencanaan, aspek pelaksanaan dan aspek monitoring dan evaluasi. Apabila hasil realisasi berada antara 99 % - 100 %, maka predikat kinerja sangat baik. Apabila kinerja berada antara 75 % - 89,9 %, maka predikat kinerja baik dan apabila realisasi berada antara 55 % - 74,9 %, maka predikat kinerja cukup atau sedang, serta jika berada dibawah 55 %, maka predikat kinerja jelek/sangat jelek.

Berdasarkan penelitian di lapangan, partisipasi masyarakat tergolong dalam tingkat partisipasi sedang, yaitu partisipasi konsultatif sampai partisipasi dengan imbalan material. Partisipasi masyarakat pada kegiatan ini sudah tergolong baik, karena masyarakat dapat menerima keberadaan kegiatan areal model hutan rakyat. Dalam pelaksanaannya, petani peserta kegiatan mengikuti semua petunjuk kegiatan dari pelaksana proyek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi.

Peneliti melakukan metodologi skoring berdasarkan kuisioner yang telah dilakukan terhadap 30 responden petani peserta kegiatan, yang tiap pertanyaan telah diberi skor/nilai yaitu partisipasi manipulatif sampai partisipasi pasif adalah 1, partisipasi konsultatif sampai partisipasi dengan imbalan material adalah 2, dan partisipasi fungsional sampai partisipasi interaktif sampai partisipasi mobilisasi swakarsa dengan nilai 3. Selanjutnya dikelompokkan berdasarkan item kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi, yang akan menunjukkan tingkat partisipasi petani peserta kegiatan dalam areal model hutan rakyat.

6. Hubungan Kondisi Sosial Ekonomi Dengan Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan pada kegiatan areal model hutan rakyat di Desa Pappaluang, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, kondisi sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat yaitu pendapatan dan luas lahan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 14 Hubungan Kondisi Sosial Ekonomi dengan Partisipasi Masyarakat

No.	Uraian	Partisipasi		
		Tinggi	Sedang	Rendah
1.	Pendapatan			
	≤ 8.400.000		12	
	≥ 8.400.000		18	
2.	Luas Lahan			
	≤ 0,5		-	
	≥ 0,5		30	
Jumlah			30	

Berdasarkan Tabel 14, tingkat pendapatan responden merupakan salah satu faktor pemacu partisipasi responden dalam kegiatan areal model hutan rakyat, sebab dengan mengikuti kegiatan ini mereka atau petani peserta kegiatan akan mendapatkan upah atau insentif untuk menambah pendapatan.

Luas lahan garapan merupakan luas lahan petani yang termasuk dalam lokasi areal model hutan rakyat. Semakin besar luas lahan garapan masyarakat, maka semakin besar pula tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan areal model hutan rakyat tersebut. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa semua petani peserta kegiatan yang memiliki luas lahan $\geq 0,5$ Ha berpartisipasi sedang, hal ini dikarenakan pemilik lahan yang mempunyai lahan yang luas beranggapan kelak mereka akan memperoleh manfaat atau hasil yang lebih banyak. Masyarakat kelompok tani hutan rakyat juga memiliki kesadaran akan pentingnya kegiatan areal model hutan rakyat ini.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Partisipasi kelompok tani dalam kegiatan perencanaan areal model hutan rakyat di Desa Pappaluang, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto tergolong kategori sedang, yaitu termasuk dalam tingkat partisipasi konsultatif sampai imbalan material, yang disebabkan karena dalam kegiatan tersebut lebih banyak ditentukan oleh pihak pelaksana proyek, masyarakat masih belum dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan.
2. Partisipasi kelompok tani dalam kegiatan pelaksanaan yaitu termasuk dalam tingkat partisipasi konsultatif sampai imbalan material, disebabkan karena petani peserta yang berpartisipasi ingin mendapatkan imbalan atau insentif dari kegiatan yang telah mereka kerjakan.
3. Partisipasi kelompok tani dalam kegiatan monitoring dan evaluasi tergolong kategori sedang, yaitu termasuk dalam tingkat partisipasi konsultatif sampai imbalan material, hal ini disebabkan karena petani peserta kegiatan menganggap bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan pekerjaan dari instansi pelaksana kegiatan.

4. Kondisi sosial ekonomi yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat pada areal model hutan rakyat adalah pendapatan karena petani peserta kegiatan akan mendapatkan upah atau insentif dengan mengikuti kegiatan, dan luas lahan yang dikarenakan pemilik lahan yang mempunyai lahan yang luas beranggapan kelak mereka akan memperoleh manfaat atau hasil yang lebih banyak.

B. Saran

Sebaiknya petani peserta kegiatan yang telah terlibat dalam setiap tahapan kegiatan areal model hutan rakyat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi, dapat ditingkatkan dengan melakukan pembinaan seperti pelatihan dan penyuluhan terhadap kelompok tani pasca proyek secara berkesinambungan mengenai kegiatan yang telah mereka kerjakan, yang dapat meningkatkan kesadaran petani dalam berpartisipasi tinggi dalam suatu kegiatan ataupun program pemerintah.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Questionnaire

I. Identitas Responden

- a. Nama :
- b. Umur :
- c. Pendidikan :
- d. Jumlah anggota keluarga :
- e. Luas Lahan
 - 1. sawah (Ha) :
 - 2. hutan rakyat (Ha) :
 - 3. kebun/tegakan/agroforestry (Ha) :
- f. Pekerjaan
 - 1. pekerjaan pokok :
 - 2. pekerjaan sampingan :
- g. Pendapatan :

II. Partisipasi Masyarakat dalam Areal Model Hutan Rakyat

- Nilai skor :
- * Manipulatif – Pasif : 1
 - * Konsultatif – Imbalan Material : 2
 - * Fungsional – Interaktif – Mobilisasi Swakarsa : 3

II.1 Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Perencanaan

A. Persiapan Lapangan

1. Tertarik mengikuti sosialisasi penyuluhan dan pelatihan karena :

- a. Ditunjuk oleh aparat desa untuk ikut (1)
- b. Diajak atau dipanggil oleh petugas kegiatan (1)
- c. Ingin menambah pengetahuan (2)
- d. Diberi biaya transportasi (2)
- e. Ingin mengetahui tentang kegiatan lebih jauh (3)
- f. Berhak ikut, karena sebagai warga desa setempat (3)
- g. Kesadaran sendiri untuk peningkatan pendapatan. Bagaimana mengurangi dan menghindari erosi dan longsor (3)

2. Dalam penyusunan rencana kegiatan

- a. Sudah ada wakil dalam penyusunan rencana kegiatan namun bukan wakil dari warga setempat (1)
- b. Sudah ditentukan oleh proyek, Anda/Bapak hanya diberitahu langkah-langkah atau tahapan pelaksanaannya (1)
- c. Bapak dimintai usulnya, bagaiman sebaiknya kegiatan tersebut dilakukan dan keputusannya tidak ada usul Bapak yang diterima (2)
- d. Bapak hanya disuruh mendengar rencana kegiatan yang telah disusun oleh penyelenggara proyek dan diberi biaya transportasi (2)

- e. Dimintai pendapat dan pendapat tersebut diterima serta menjadi salah satu keputusan bersama dalam rencana kegiatan (3)
 - f. Bapak ikut mengusulkan penyusunan rencana kegiatan karena sadar akan manfaat dari kegiatan tersebut (3)
3. Menyiapkan lahan milik untuk lokasi kegiatan areal model hutan rakyat
 - a. Lahan Bapak diminta untuk lokasi kegiatan dengan mendapat imbalan material (2)
 - b. Bapak dimintai tanggapan atau masukan mengenai lahan yang dapat digunakan untuk lokasi kegiatan (2)
 - c. Bapak memberikan lahan milik Bapak karena sadar akan penggunaan lahan tersebut (3)
 - d. Apakah Bapak mengizinkan lahan Bapak digunakan untuk lokasi dengan Bapak turut bekerja pada lahan Bapak (3)
 4. Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan kelompok tani
 - a. Ditunjuk oleh petugas lapangan untuk mengikuti pertemuan (1)
 - b. Bapak tahu akan diadakan pertemuan kelompok tani namun Bapak tidak dipanggil (1)
 - c. Dalam penyelenggaraan pertemuan, Bapak dimintai tanggapan atas masalah yang ada (2)
 - d. Mengikuti pertemuan karena mendapat imbalan dari petugas/LSM (2)
 - e. Bapak sadar dan tahu manfaat dari mengikuti pertemuan kelompok tani (3)
 5. Menyusun perangkat aturan/kesepakatan-kesepakatan internal kelompok tani
 - a. Bapak ditunjuk oleh aparat desa untuk ikut (1)
 - b. Bapak hanya diberitahu hasil/kesepakatan yang telah ada (1)
 - c. Dalam penyusunan, Bapak dimintai tanggapan atau tidak (2)
 - d. Diberi biaya transportasi untuk mengikuti kegiatan (2)
 - e. Bapak membentuk kelompok tani dan aturan-aturannya sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah/proyek (3)
 - f. Pendapat Bapak dijadikan salah satu aturan internal kelompok (3)
 - g. Adanya kesadaran dalam menyusun perangkat aturan internal kelompok demi kepentingan bersama (3)

II.2 Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pelaksanaan

A. Penataan Areal Tanaman

1. Pemancangan tanda batas dan pengukuran lapangan
 - a. Bapak dimintai tanggapan dalam pelaksanaan kegiatan ini (2)
 - b. Dalam kegiatan ini Bapak diberi upah untuk mengikutinya (2)
 - c. Bapak mengukur areal sesuai dengan petunjuk proyek (3)
 - d. Bapak mengetahui pentingnya kegiatan ini dan ikut melakukan kegiatan ini (3)
 - e. Bapak ikut karena memiliki hak atas lahan atau areal setempat (3)

2. Pembersihan lapangan

- a. Bapak dimintai tanggapan dalam kegiatan ini (2)
- b. Dalam kegiatan ini Bapak ikut karena diberi upah (2)
- c. Bapak membersihkan areal sesuai dengan petunjuk proyek (3)
- d. Bapak ikut membersihkan lapangan karena berhak atas lahan Bapak yang akan dibersihkan (3)
- e. Sadar akan pentingnya pembersihan lapangan dalam keberlanjutan kegiatan (3)

3. Penentuan arah larikan serta pemancangan ajir

- a. Bapak dimintai tanggapan dalam kegiatan ini (2)
- b. Bapak mendapat imbalan dari kegiatan ini (2)
- c. Melakukan kegiatan ini sesuai petunjuk proyek (3)
- d. Bapak ikut kegiatan ini karena memiliki hak atas lahan yang akan dikerja (3)
- e. Bapak tahu dan sadar akan dampak dari kegiatan ini (3)

4. Pembuatan piringan tanaman disekeliling ajir

- a. Bapak dimintai pendapat atas kegiatan ini (2)
- b. Bapak memperoleh imbalan (2)
- c. Kegiatan ini dilakukan sesuai proyek (3)
- d. Bapak tahu manfaat dari pembuatan piringan tanaman ini (3)

5. Pembuatan lubang tanaman

- a. Bapak mendapat imbalan dari kegiatan ini (2)
- b. Pembuatan lubang tanaman sesuai petunjuk proyek (3)
- c. Membuat lubang tanaman karena lahan yang dimiliki adalah lahan Bapak (3)
- d. Kesadaran sendiri untuk membuat lubang tanaman (3)

B. Pengadaan Bibit Tanaman

- a) Ditunjuk oleh aparat desa untuk ikut (1)
- b) Bapak diberitahu mengenai pengadaan bibit tanaman (1)
- c) Dimintai tanggapan atas kegiatan ini (2)
- d) Diberi biaya/imbalan (2)
- e) Membuat bibit tanaman sudah diatur jumlahnya (3)
- f) Ingin menambah ilmu pengetahuan dengan ikut kegiatan (3)
- g) Sadar dan tahu bahwa kegiatan ini bermanfaat (3)

C. Penanaman

- a) Diberi imbalan/biaya dalam pelaksanaan kegiatan (2)
- b) Bapak dimintai tanggapan mengenai penanaman, tata cara, dll (2)
- c) Melakukan penanaman sesuai proyek (3)
- d) Sadar sendiri, penanaman bermanfaat untuk kehidupan (3)

D. Pemeliharaan

1. Penyulaman

- a. Ditunjuk oleh aparat desa atau petugas lapangan untuk ikut (1)
- b. Bapak dimintai pendapat mengenai penyulaman (2)
- c. Mendapat imbalan (2)
- d. Penyulaman merupakan salah satu kegiatan petunjuk dalam proyek (3)
- e. Mengetahui pentingnya kegiatan ini (3)

2. Penyiangan dan Pendangiran

- a. Ditunjuk oleh petugas atau aparat desa untuk ikut (1)
- b. Bapak dimintai tanggapan akan kegiatan ini (2)
- c. Bapak memperoleh imbalan dari kegiatan ini (2)
- d. Tahu dan sadar akan manfaat kegiatan ini (3)

3. Pemupukan

- a. Ditunjuk oleh aparat desa atau petugas lapangan (1)
- b. Sudah ditentukan oleh proyek, Bapak hanya diberitahu langkah-langkah pelaksanaan dari kegiatan pemupukan (1)
- c. Bapak dimintai usul, bagaimana sebaiknya pemupukan dilakukan, tapi usul bapak tidak dilaksanakan (2)
- d. Dalam kegiatan ini, Bapak diberi biaya (2)
- e. Pemupukan merupakan salah satu kegiatan/tujuan proyek (3)
- f. Dimintai pendapat dan pendapat tersebut diterima dan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan (3)
- g. Bapak ikut kegiatan ini karena sadar akan manfaat kegiatan ini (3)

4. Pemberantasan Hama dan Penyakit

- a. Bapak ditunjuk oleh aparat desa atau petugas lapangan (1)
- b. Diberitahu langkah-langkah pelaksanaan kegiatan oleh petugas lapangan (1)
- c. Dimintai tanggapan, namun tanggapan bapak tidak diterima (2)
- d. Diberi imbalan (2)
- e. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan proyek, Bapak hanya mengerjakannya (3)
- f. Melakukan kegiatan ini karena berhak atas lahan yang dikerja (3)
- g. Sadar akan pentingnya kegiatan ini (3)

II. 3 Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan

A. Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring, melihat sejauh mana pekerjaan telah dilaksanakan
 - a. Bapak hanya diberitahu hasil yang telah ada (1)
 - b. Bapak dimintai tanggapan mengenai kegiatan dari awal, tapi tanggapan bapak tidak diterima (2)
 - c. Untuk melakukan kegiatan ini, Bapak diberi biaya transportasi (2)
 - d. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan proyek, Bapak hanya mengerjakannya (Fungsional)
 - e. Bapak melakukan kegiatan ini karena berhak untuk tahu bagaimana hasil dari kegiatan yang telah Bapak kerjakan (Interaktif)
 - f. Kesadaran sendiri untuk mengetahui manfaat dari proyek mulai dari awal hingga monitoring (Mobilisasi Swakarsa)

2. Evaluasi, mengukur/menghitung pekerjaan yang telah dilaksanakan
 - a. Bapak hanya diberitahu hasil yang telah ada (1)
 - b. Bapak dimintai tanggapan mengenai kegiatan dari awal, tapi tanggapan bapak tidak diterima (2)
 - c. Untuk melakukan kegiatan ini, Bapak diberi biaya transportasi (2)
 - d. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan proyek, Bapak hanya mengerjakannya (3)
 - e. Bapak melakukan kegiatan ini karena berhak untuk tahu bagaimana hasil dari kegiatan yang telah Bapak kerjakan (3)
 - f. Kesadaran sendiri untuk mengetahui manfaat dari proyek mulai dari awal hingga evaluasi (3)

III. Partisipasi Pasca Proyek

1. Mengembangkan kegiatan ini setelah proyek berakhir

Lampiran 2

Tabel Identitas dan Faktor Sosial Ekonomi Responden Di Desa Pappaluang,
Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, 2009

No	Nama Petani	Umur	Pendidikan	Jumlah Tanggungan Keluarga	Pendapatan Per Tahun (Rp)	Luas Lahan (Ha)	Jabatan Dalam Kelompok Tani
1.	Abd. Rasyid	35	SMA	3	20.000.000	3,5	SekDes&K.Klmpk
2.	Baso	40	–	2	12.198.000	2,5	Anggota
3.	Muksin	27	–	2	6.429.000	1	Anggota
4.	Rudding. R	35	SD	3	9.668.000	2	Anggota
5.	Supardi	32	SMP	2	8.500.000	1	Anggota
6.	Jufri	37	–	2	6.200.000	1	Anggota
7.	Gassing	27	SD	2	7.823.000	2	Anggota
8.	Paca	50	–	1	7.000.000	1	Anggota
9.	Jumasang	33	–	3	15.000.000	2,5	Anggota
10.	M. Nur	40	SD	1	11.200.000	1	Anggota
11.	Rudding. T	33	–	3	8.000.000	1	Anggota
12.	Matu	45	–	1	10.000.000	0,75	Anggota
13.	Cambang	45	–	4	7.500.000	1,5	Anggota
14.	Syamsuddin	25	SMP	2	6.539.000	1,5	Ketua Kelompok
15.	Marlin	20	SD	3	7.000.000	0,75	Anggota
16.	Sumang	25	–	3	7.500.000	0,75	Anggota
17.	Sukku	35	–	2	6.000.000	0,75	Anggota
18.	Jumasang	23	SD	3	19.206.000	2,5	Anggota
19.	Tayang	20	SD	2	7.000.000	0,75	Anggota
20.	Juddin	23	–	2	6.800.000	0,5	Anggota
21.	Jarung	25	–	1	6.000.000	0,5	Anggota
22.	Pacadang	52	SD	1	14.737.000	2	Kepala Dusun
23.	Tamba	30	–	5	6.500.000	0,5	Anggota
24.	Sanai	30	–	4	7.162.500	0,75	Anggota
25.	Maka	60	–	2	7.500.000	1	Anggota
26.	Jara	40	–	3	7.500.000	0,75	Anggota
27.	Dg. Nurung	35	–	5	11.000.000	1,5	Anggota
28.	Sawaji	29	SD	4	9.000.000	1	Anggota
29.	Judding	25	SD	2	8.500.000	1	Anggota
30.	Nurdin	25	SD	2	8.000.000	1	Anggota
Jumlah		1001	–	75	241.266.000	35,25	
Rata-rata		33,37	–	2,5	8.042.200	1,175	

No	Responden	Tingkat Partisipasi Pada Pelaksanaan											Σ Skor	Kategori Partisipasi			
		Item Pertanyaan															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	Abd. Rasyid	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	2	3	1	2,6	Sedang
2	Baso	2	3	3	2	2	3	3	2	3	3	3	1	1	1	2,2	Sedang
3	Muksin	3	2	3	2	1	3	2	1	3	3	2	1	1	3	2,1	Sedang
4	Rudding. R	3	2	1	1	3	3	3	3	3	3	3	1	3	1	2,1	Sedang
5	Supardi	3	2	3	3	1	3	2	2	2	2	2	2	3	1	2,2	Sedang
6	Jufri	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	2	3	1	2,6	Sedang
7	Gassing	2	2	3	3	2	3	2	2	3	3	2	1	1	1	2,1	Sedang
8	Paca	1	2	3	3	1	3	2	1	3	2	2	2	3	2	2,2	Sedang
9	Jumasang	3	2	3	3	1	3	3	1	2	3	3	2	1	3	2,3	Sedang
10	M. Nur	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	1	2,6	Sedang
11	Rudding. T	3	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	1	2	3	2,3	Sedang
12	Matu	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	2	1	2,4	Sedang
13	Cambang	3	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	3	2	1	2,3	Sedang
14	Syamsuddin	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	0	1	0	2,2	Sedang
15	Marlin	2	2	3	3	3	3	2	3	2	3	3	0	2	0	2,1	Sedang
16	Sumang	3	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	0	3	0	2,2	Sedang
17	Sukku	3	2	3	3	1	3	2	2	3	2	2	0	3	0	2,1	Sedang
18	Jumasang	2	2	3	3	2	3	2	2	3	3	3	0	3	0	2,1	Sedang
19	Tayang	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	3	0	2,2	Sedang
20	Juddin	3	3	3	2	1	2	2	2	2	2	2	0	2	0	1,8	Rendah
21	Jarung	2	2	3	3	1	2	2	2	2	2	2	0	2	0	1,8	Rendah
22	Pacadang	3	2	2	2	2	3	3	2	3	3	3	3	1	3	2,4	Sedang
23	Tamba	2	2	3	3	2	2	2	2	2	3	3	0	2	0	1,9	Rendah
24	Sanai	3	2	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	1	2	2,3	Sedang
25	Maka	1	2	3	3	2	3	2	2	3	3	1	3	1	3	2,2	Sedang
26	Jara	3	2	3	3	2	3	2	1	3	2	2	0	2	0	1,9	Rendah
27	Dg. Nurung	3	1	3	2	3	2	3	3	3	3	2	3	2	2	2,4	Sedang
28	Sawaji	2	1	3	3	2	3	2	2	2	3	2	3	2	3	2,3	Sedang
29	Judding	3	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	3	1	2	2,2	Sedang
30	Nurdin	2	1	3	2	3	2	2	3	3	2	3	3	2	2	2,3	Sedang

Lampiran 5

No	Responden	Tingkat Partisipasi Pada Monitoring dan Evaluasi		Σ Skor	Kategori Partisipasi
		Item Pertanyaan			
		1	2		
1	Abd. Rasyid	3	2	2,5	Sedang
2	Baso	2	1	1,5	Rendah
3	Muksin	1	1	1	Rendah
4	Rudding. R	3	3	3	Tinggi
5	Supardi	1	1	1	Rendah
6	Jufri	3	3	3	Tinggi
7	Gassing	1	1	1	Rendah
8	Paca	1	3	2	Sedang
9	Jumasang	1	3	2	Sedang
10	M. Nur	1	3	2	Sedang
11	Rudding. T	1	3	2	Sedang
12	Matu	2	3	2,5	Sedang
13	Cambang	1	2	1,5	Rendah
14	Syamsuddin	3	3	3	Tinggi
15	Marlin	1	2	1,5	Rendah
16	Sumang	3	2	2,5	Sedang
17	Sukku	2	2	2	Sedang
18	Jumasang	1	2	1,5	Rendah
19	Tayang	2	1	1,5	Rendah
20	Juddin	3	3	3	Tinggi
21	Jarung	1	2	1,5	Rendah
22	Pacadang	2	3	2,5	Sedang
23	Tamba	3	2	2,5	Sedang
24	Sanai	2	3	2,5	Sedang
25	Maka	2	2	2	Sedang
26	Jara	1	2	1,5	Rendah
27	Dg. Nurung	3	1	2	Sedang
28	Sawaji	3	2	2,5	Sedang
29	Judding	1	3	2	Sedang
30	Nurdin	3	3	3	Tinggi

Lampiran 6

Klasifikasi Tingkat Partisipasi Petani Pada Program Areal Model Hutan Rakyat

Tabel Distribusi Frekuensi untuk kegiatan perencanaan sebagai berikut :

No.	Tingkat Partisipasi	Jumlah Responden	Persentase
1	Rendah (Manipulatif – Pasif)	14	46,67 %
2	Sedang (Konsultatif – Imbalan Material)	15	50 %
3	Tinggi (Fungsional – Interaktif – Mobilisasi Swakarsa)	1	3,33 %
	Jumlah Total	30	100 %

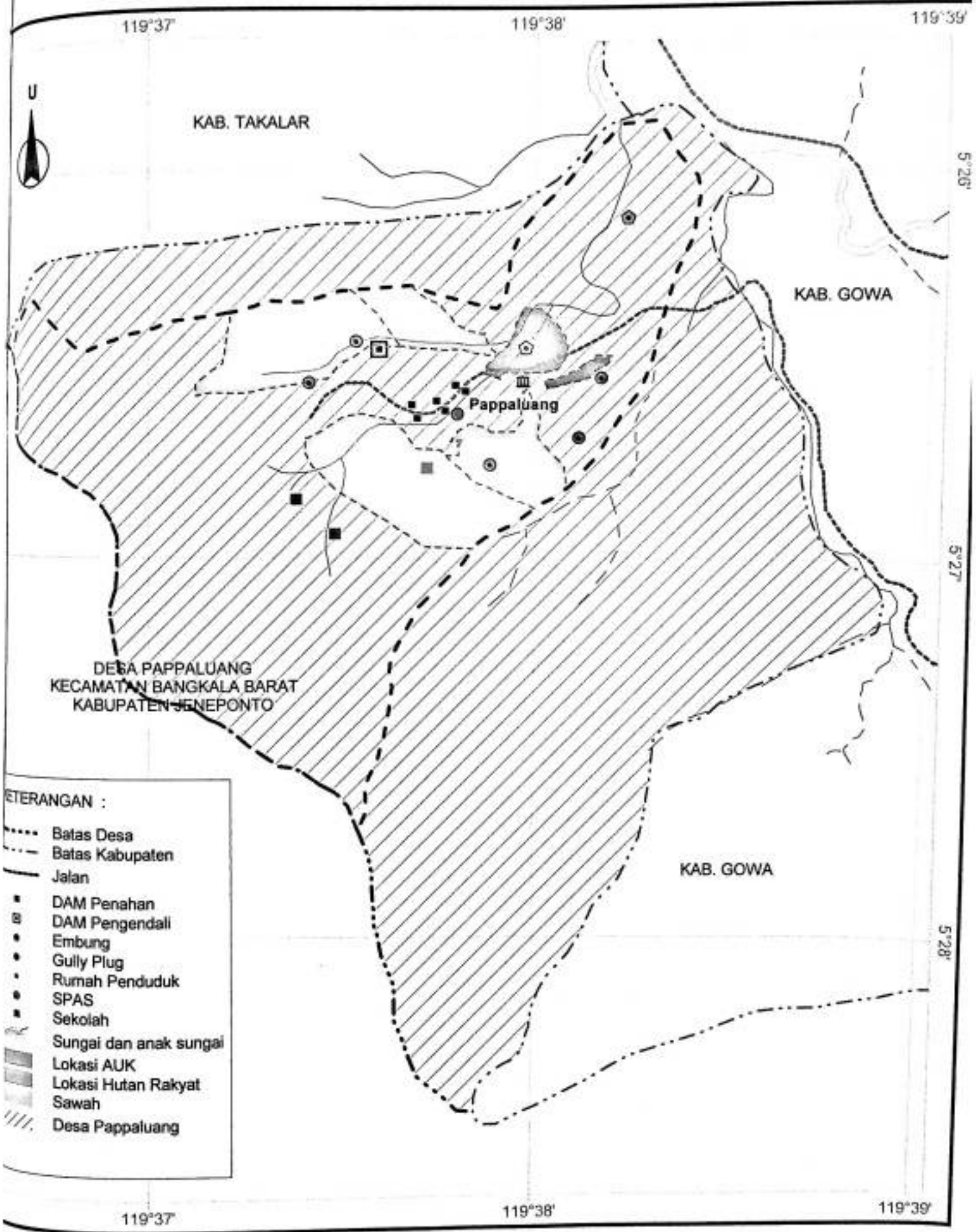
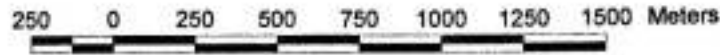
Tabel Distribusi Frekuensi untuk kegiatan pelaksanaan sebagai berikut :

No.	Tingkat Partisipasi	Jumlah Responden	Persentase
1	Rendah (Manipulatif – Pasif)	4	13,33 %
2	Sedang (Konsultatif – Imbalan Material)	26	86,67 %
3	Tinggi (Fungsional – Interaktif – Mobilisasi Swakarsa)	0	0
	Jumlah Total	30	100 %

Tabel Distribusi Frekuensi untuk kegiatan monitoring dan evaluasi sebagai berikut :

No.	Tingkat Partisipasi	Jumlah Responden	Persentase
1	Rendah (Manipulatif – Pasif)	10	33,33 %
2	Sedang (Konsultatif – Imbalan Material)	15	50 %
3	Tinggi (Fungsional – Interaktif – Mobilisasi Swakarsa)	5	16,67 %
	Jumlah Total	30	100 %

PETA
DESA PAPPALUANG
KECAMATAN BANGKALA BARAT
SKALA 1 : 25.000



- PETERANGAN :**
- Batas Desa
 - - - - - Batas Kabupaten
 - Jalan
 - DAM Penahan
 - DAM Pengendali
 - Embung
 - Gully Plug
 - Rumah Penduduk
 - SPAS
 - Sekolah
 - ~ Sungai dan anak sungai
 - ██ Lokasi AUK
 - ██ Lokasi Hutan Rakyat
 - ██ Sawah
 - //// Desa Pappaluang